

**DEFINISI *BĀLIGH* MENURUT HUKUM ISLAM &
HUKUM POSITIF TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN
ORANG TUA DALAM PEMBERIAN NAFKAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (SI)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:
Ulul Umami
NIM. 1502016037

**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2019**



KEMENTIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam: 4 (empat) eks.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ulul Umami

NIM : 1502016037

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah)

Judul : **"Definisi Baligh Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 04 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

Hj. Lathifah Munawaroh, LC, M.A
NIP. 19800919201503 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

Nama : Ulul Umami
NIM : 1502016037
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*)
Judul : **DEFINISI BALIGH MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TERKAIT KEWAJIBAN ORANG TUA
DALAM PEMBERIAN NAFKAH**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

30 September 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I
tahun akademik 2019.

Semarang, 30 September 2019

Ketua Sidang

Moh. Khasan, M.Ag.
NIP.19741212 200312 1 004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Penguji I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP.19670321 199303 1 005

Penguji 2

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003



Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, LC, M.A.
NIP. 19800919201503 2 003

MOTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf.

(Q.s. A-Baqarah ayat [2] : 233)

PERSEMBAHAN

Hasil karya tulis ini saya persembahkan kepada:

*Ibu tercinta dan Almarhum Bapak terkasih yang tidak pernah
goyah keyakinannya padaku*

Kakak laki-laki dan adik perempuanku tersayang

*Segenap keluarga besar santri PONPES Fadhlul Fadhlul Mijen
Semarang*

*Terimakasih untuk teman-temanku kelas HK-A yang
mendampingi dan memberikan semangat.*

*Terimakasih pula untuk Eva Rusdiana Puspitasari yang selalu
menemani dalam suka dan duka.*

*Saya Ucapkan terimakasih pula untuk temanku M. Aldian
Muzakky yang mendukung dan menyemangati selama proses
penyelesaian skripsi.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 September 2019

Deklarator,



Ulul Umami
NIM 1502016037

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ta	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatkah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap


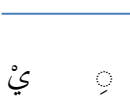
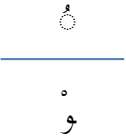
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i

وْ	Fathah dan wau	Au	a dan i
----	-------------------	----	---------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

ABSTRAK

Bāligh artinya seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum syariat, disebut juga taklif. Dengan adanya beban dan tuntutan tersebut, kemudian disebut sebagai mukalaf, yaitu seseorang yang telah diberikan beban syariat untuk mengamalkannya. Di Indonsia penggunaan makna baligh bukan semata-mata persoalan ukuran umur. Seseorang yang telah dinyatakan dewasa tidak bisa dinilai hanya dengan fisik dan perkembangan biologisnya, tetapi sudah masuk dalam berbagai disiplin hukum dan ranah *fiqh*. Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah perbedaan dari disiplin hukum yang memiliki pandangan berbeda tentang usia *bāligh*. Kerusialnya makna *bāligh* justru sangat berpengaruh dengan berbagai macam aspek yang menjadi syarat untuk melakukan ibadah, muamalah serta kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana status *bāligh* menurut hukum Islam dan hukum positif. Dan bagaimana kaitannya usia *bāligh* terhadap kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status *bāligh* menurut hukum islam dan hukum positif yang berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal atau penelitian pustaka (library research) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan setudi kepustakaan melalui dokumentasi, selanjutnya data dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *bāligh* memiliki 3 ciri-ciri dalam agama Islam yakni *Balagha al-hulum* identik dengan kedewasaan seseorang dalam konteks kedewasaan fisik secara biologis bisa dilihat, Sedangkan *balaqhū al-nikāh* mengandung kedewasaan seseorang dalam konteks tanggung jawab terkait erat dengan mental khususnya dalam kecakapan dan mampu mengelola harta, kemudian *balagha asyuddah* seseorang yang dalam hal ini sudah sempurna akal nya. Dengan ini *bāligh* yang harus di ikuti adalah *balagha asyuddah* yang mana aspek kedewasaan yang lebih substansi dan esensial yaitu *al-rusyd* (kecakapan dan kepandaian) dan telah *asyuddah* (telah sempurna kekuatannya, akal nya, dan pandangannya). Gugurnya nafkah orang tua terhadap anak yang sudah *bāligh* dalam hukum Islam yakni usia 18 tahun orang tua sudah tidak wajib menafkahi anak. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penggabungan antarai *ijtihad imtiqa'i* dan *ijtihad insyai*.

Kata Kunci: Status Bāligh, kewajiban Orang tua, Nafkah, Hukum Islam dan Hukum Positif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul Definisi Baligh Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D. dan Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., MA. Selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Kepada Ibu Dra. Endang Rumaningsih, M. Hum. selaku wali dosen yang telah menjadi inspirasi dan penyemangat dalam memperbaiki etos belajar.
3. Kepada Dr. KH. Fadlolan Musyaffa' Lc., MA. Dan Hj. Fenti Hidayah, Sp. Di. Selaku pengasuh Pon-Pes Fadhlul Fadhlun yang telah merestui dan mendo'akan para santrinya serta membimbing dan mengajarkan ilmu dan kekuatan dari ketulusan, keikhlasan dalam mencari ilmu yang sejati dunia dan akhirat sehingga saya dapat menemukan jati diri.
4. Terimakasih kepada Bapak Wasis Priyanto, S.H., M.H. Hakim Ketua PN Ungaran yang telah bersedia menjadi teman diskusi mengenai permasalahan hukum yang penulis sedang pelajari guna melengkapi analisis yang tengah penulis kerjakan.
5. Terimakasih kepada ayahanda Alm. Bapak H. Sapar dan ibunda Hj. Sri Munafiroh tercinta yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil dengan setulus hati serta senantiasa mendoakan saya siang maupun malam hari di tanah rantau dengan penuh rasa sayang, akhirnya saya dapat menyelesaikan study di UIN Walisongo Semarang.

6. Kepada Kakak Kandung saya Arif Hidayat dan adik kandung tersayang saya Zeny Rahmawati yang selalu menyemangati dan mendoakan saya.
7. Kepada teman-teman mahasiswa dan para sahabat terkasih di Pon-Pes Fadhlul Fadhlun terkhusus alumni anggota kamar 12 yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan, memberikan masukan dalam penggarapan skripsi ini.
8. Kepada kawan-kawan KKN Posko 22 yang telah menjadi keluarga singkat dalam waktu 45 hari.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 30 Oktober 2019

Penulis

Ulul Umami

NIM: 150201603

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	31

BAB II DEFINISI BALIGH MENURUT HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF

A. Konsep Baligh Menurut Hukum Islam.....	34
1. Pengertian baligh.....	34
2. Baligh menurut UU Perkawinan	38
3. Baligh menurut KHI.....	39
4. Ciri-ciri kedewasaan menurut hukum Islam	41
B. Konsep Baligh Menurut Hukum Positif	56
1. Ketentuan baligh menurut KUH Perdata.....	57
2. Ketentuan baligh menurut KUH Pidana.....	63
3. Ketentuan baligh menurut Hukum Adat	68
4. Ketentuan baligh menurut Undang- Undang RI	70
C. Macam-macam kedewasaan	71
D. Ciri-ciri karakteristik kedewasaan menurut kematangan mosional	75
E. Konsep masalah mursalah	78

BAB III HUBUNGAN USIA BALIGH TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMBERIAN NAFKAH

- A. Hubungan usia baligh terhadap kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah menurut hukum Islam 85
- B. Hubungan usia baligh terhadap kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah menurut hukum positif..... 136
- C. Pengaruh memberikan nafkah untuk perkembangan anak yang sudah dewasa (*baligh*) menurut Psikologi 147

BAB IV ANALISIS STATUS USIA BALIGH MENURUT HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMBERIAN NAFKAH

- A. Analisis status baligh menurut hukum Islam dan hukum positif 156
- B. Analisis kaitannya usia baligh terhadap kewajiban orang tua dalam Pemberian Nafkah 176
- C. Analisis kelemahan definisi baligh menurut hukum Islam 194

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	205
B. Saran	206
C. Penutup	207

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal utama yang diharapkan dari proses dialektika antara nilai-nilai Islam dengan modernitas adalah eksistensi dan kompatibilitas Islam di era modern, tentunya dengan mengarahkan berbagai usaha untuk mewujudkannya. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa kemampuan Islam berdialog secara harmoni dengan perubahan terdapat pada jati diri Islam itu sendiri. Kemampuan tersebut terlihat dari karakteristik Islam sebagai agama *rabbā'niyyah* (bersumber dari Tuhan dan terjaga autentitasnya), *insā'niyyah* (sesuai dengan fitrah dan demi kepentingan manusia), *wasā'tiyyah* (moderat mengambil jalan tengah), *wāqi'iyyah* (kontekstual) jelas dan harmoni antara perubahan hukum dan ketetapannya.

Sementara suatu hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat (*social control*), juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat (*Social engineering*). Dalam masyarakat, hukum diciptakan manusia dan merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam

masyarakat pada masanya. Disini terjadi dialektika antara hukum dan masyarakat, artinya hukum dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya dan sebaliknya hukum akan berpengaruh terhadap masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Komaruddin Hidayat bahwa sepanjang sejarah nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan senantiasa hidup. Keduanya menjadi acuan atau sumber dalam pembentukan hukum. Berbagai perubahan sosial terjadi karena terpicu dan terinspirasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan nilai semangat keagamaan. Meskipun ajaran agama islam diyakini datang dari Allah Swt, namun ketika ajaran tersebut berada dalam ranah sejarah kemanusiaan, berbagai perkembangan muncul dan sering kali mengakibatkan perdebatan.¹

Salah satunya dari perdebatan tersebut ialah usia dewasa yang dianggap cakap dalam hukum, masih belum tuntas diperdebatkan oleh para ulama maupun oleh pemerintah indonesia. Ketidakseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai

¹ Faiqotul Mala, *Otoritas Hadits-hadits Bermasalah Dalam Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 1-2.

peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Pemerintah Indonesia ternyata memiliki beberapa undang-undang mengenai batasan kedewasaan yang berbeda-beda, misalnya di dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 terdapat ketentuan 16 tahun bagi perempuan untuk menikah, sementara di dalam Undang-Undang ketenagakerjaan terdapat ketentuan 18 tahun untuk menjadi tenaga kerja. Berdasarkan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemukan keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas tahun).² Sementara para ulama mengkatagorikan usia dewasa bila ia sudah baligh. Usia baligh pada anak menurut Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya *Safinatun Najah* adalah Sempurnanya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya seperma setelah berumur Sembilan tahun bagi anak

² Nurkholis, *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan UU & Hukum Islam*, (Jurnal Yudisia Vol. 8 No. 1, Juni 2017). hlm. 75.

laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur Sembilan tahun bagi anak perempuan.

Sedangkan dalam perkembangan kepribadian seseorang maka remaja mempunyai arti khusus, namun begitu masa remaja tidak jelas statusnya dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Monks dan kawan-kawan lebih lanjut mengatakan bahwa sesungguhnya remaja tidak mempunyai tempat yang jelas, ia tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak termasuk golongan dewasa atau golongan tua. Remaja masih belum mampu menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya. Gejala psikologis yang mencirikan remaja adalah sifat-sifat masa transisi atau peralihan, dimana remaja belum memperoleh status sebagai orang dewasa, akan tetapi mereka tidak lagi memiliki masa kanak-kanak.³

Permasalahan ini semakin mengerucut dikarenakan hak orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak berhenti saat anak dikatakan baligh (sudah dewasa). Pengertian baligh atau sudah dewasa menjadi

³ Miftahul Jannah, *Psiko islam media Remaja dan Tugas-tugas Perkembangannya Dalam Islam*, (Journal Psikologi ISSN: 2503-3611, Volume 1, Nomor 1, April 2016, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry), hlm.246.

dilema, yang dianggap dewasa menurut hukum islam dan hukum positif memiliki ketidaksamaan. Untuk memberikan kepastian status balig tentunya harus mengetahui tingkat pertumbuhan anak, agar bisa dikatakan baligh ataupun dewasa. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴ Dengan menunaikan dan memberikan yang terbaik. Melalui hak Anak dari orang tua tertera di dalam Pernyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia atau di sebut UDHR (*Universal Declaration Of Human*

⁴ Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Rights) adalah merupakan sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa dalam pasal (25) ayat (2) ditegaskan:

“ Ibu-ibu dan anak-anak berhak memperoleh perawatan dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar pernikahan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama” .

Kemudian di dalam pasal (26) ayat (3) ditegaskan pula:

“ Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih macam pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan:

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang

*ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya ...”*⁵

Ayat 233 surah Al-Baqarah sebagaimana dikutip di atas menegaskan tentang hak-hak anak yang wajib dipenuhi orang tuanya berupa pangan dan sandang. Kemudian ayat 6 surah At-Tahrim menegaskan kewajiban seorang ayah untuk memberikan hak-hak keluarga, yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka dengan memberikan pendidikan dan pengajaran ketuhanan (agama) di dalam keluarga. Sebab orang tua di dalam keluarga, turut memberikan kontribusi terhadap masa depan anak-anaknya, apakah mereka jadi orang baik atau jahat. Sebagai mana ditegaskan di dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
رَحْمَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ
كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ

⁵ Kosasih, HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat. (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003). hlm. 73.

نُتَجُّ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ (رواه البخاري - ١٢٩٦)

Artinya: *Telah menceritakan kepada Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bin dari Az-zuhriyyi dari Abu Salamah bin Abdur rahman dari Abu Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?* (H.R. Bukhari).⁶

Di dalam surah Al-Baqarah dan surah At-Tahrim ditegaskan bahwa salah satu kewajiban orang tua kepada keluarga dan anaknya adalah memberi nafkah. Kata *nafkah* berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan, sedangkan bentuk jamak dari nafkah yaitu *nafaqat* berarti sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Pada umumnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya. Adapun

⁶ Imam Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari, Bab al-jana'iz, bab ma qila aulad al-musyrikin*, juz 5 dari Maktabah al-Shamila, hlm. 182. No. 1296

nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk didalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, prabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.⁷

Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.⁸

Nafkah anak hukumnya wajib karena Allah SWT berfirman yang artinya:

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al - Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 10 Terjemahan*, Penj, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani), 2011. hlm. 94

⁸ Ibid. hlm. 95.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut....
(al-Baqarah: 233)

Dan firman Allah SWT:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*.”

Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan

dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Sebagaimana firman Allah yang artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”
(QS. Ath- Thalaq: 7)⁹

Ada juga yang mengatakan, tidak boleh menimpalkan madhorot pada kerabatnya. Demikian di katakan oleh Mujahid, asy-Sya’bi, dan adh-Dhahhak. Ada juga yang mengatakan, kepada ahli waris diwajibkan pula seperti yang diwajibkan kepada anak bapak itu. Yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Demikian pendapat jumhur ulama. Yang demikian itu telah di bahas panjang oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ayat itu juga dijadikan dalil oleh para pengikut madzhab Hanafi dan Hambali yang mewajibkan pemberian nafkah kepada kaum kerabat, sebagian atas sebagian yang lain. Hal ini merupakan

⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Penj. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu’ti, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hlm. 470.

tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Anak merupakan rahmat Allah SWT bagi hamba-hambanya, dimana dia mengingatkan kepada kedua orang tua untuk senantiasa memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka, serta membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan juga anak-anaknya.¹⁰

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, anak-anak yang wajib di nafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah, anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya. Artinya, seseorang kakek wajib memberi nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur mana pun, karena anak itu termasuk di dalamnya anak langsung dan anak tidak langsung. Inilah pendapat yang shahih. Nafkah ini juga wajib karena termasuk bagian dari satu kesatuan, bukan karena warisan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas penulis terfokus pada pengertian baligh yang sesungguhnya dan bagaimana bila dikaitkan dengan kewajiban orang tua dalam

¹⁰ Ibid. hlm. 471.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz 10, Penj, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 136-137.

pemberian nafkah kepada anak dikarenakan usia baligh atau dewasa masih menjadi perdebatan karena itu setatus baligh atau dewasa dipertanyakan, dengan ini penulis membuat judul: *“Definisi Baligh Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah”*.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang singkat di atas maka rumusan masalah dalam judul skripsi ini diantaranya mengingat luasnya pembahasan, penulis hanya membatasi permasalahan. Dari pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status baligh menurut hukum islam dan hukum positif?
2. Bagaimana kaitannya usia baligh terhadap Kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui status balig menurut hukum islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui kaitannya usia baligh terhadap kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah.

Adapun yang menjadi manfaat dalam melakukan penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Bagi penulis sendiri sangat memberikan manfaat sekali kepada diri penulis dan juga untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan. Selain itu memberikan sesuatu yang segar untuk dikaji karena problema yang kerap dialami sebagian besar masyarakat Indonesia.
2. Bagi masyarakat luas serta para pembaca, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berpengaruh dalam kemandirian dan perkembangan seorang anak yang sudah dewasa bila masih mengandalkan nafkah orang tuanya.
3. Untuk memberi tambahan ilmu, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti dikemudian hari agar bisa dikembangkan kembali sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Selain itu sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.

D. Kajian Pustaka

Perbedaan judul penelitian yang penulis buat dengan yang pernah diteliti sebelumnya adalah di dalam penelitian ini, menyingkap bagaimana “*Definisi Baligh Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Dengan Kewajiban Orang Tua Dalam Pemberian Nafkah*”

Sekripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana definisi baligh menurut hukum Islam dan hukum positif, terkait dengan hak orang tua dalam pemberian nafkah kepada anak. Intinya seperti apa devinisi balig menurut ulama dan berapa usia yang dikatakan balig menurut hukum islam dan hukum positif, baik baligh dari segi sosiologi, fisiologi dan lainnya. Kemudian di kaitkan dengan kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah kepada anak. Penelitian ini menerapkan sebuah metode Kualitatif dengan teknik Kepustakaan/Buku Catatan dan informasi. Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topic yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah

dilakukan oleh peneliti yang lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. \\Sejauh pengetahuan penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai definisi baligh menurut hukum Islam dan hukum positif yang terkait dengan kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah, belum ada yang membahasnya secara lebih spesifik, penulis belum pernah menjumpai karya ilmiah maupun penelitian yang secara khusus membahas tentang judul yang penulis buat. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Pertama Skripsi yang disusun oleh Ahmad Syamsul Huda, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Walisongo Semarang dengan judul "Analisis Pendapat Imam Al- Mardawy Tentang Nafkah Orang Tua Terhadap Anak Yang Sudah Dewasa". Hasil dari penelitian ini adalah: Berkaitan dengan nafkah, Imam al-Mardawy tidak mengukur dengan menggunakan batasan usia, namun Imam al-Mardawy menggunakan batasan fakir. Jadi Imam Al-Mardawy menjadikan fakir sebagai illat, bahwa orang

tua masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat asalkan berkeadaan fakir bukanlah menjadi halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Metode *Istinbat* Imam al-Mardawy dalam permasalahan nafkah anak yang sudah dewasa. Ia berpijak dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi saw yang berstatus sahkh, yang mana hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak perowi hadits, diantaranya Imam al-Bukhari dan muslim.¹² Perbedaan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis adalah, dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana definisi baligh dalam hukum islam dan hukum positif dan bagaimana istinbath hukumnya bila dikaitkan dengan kewajiban pemberian nafkah orang tua, bagaimana caranya mengetahui bahwa seorang anak itu sudah mandiri dan dilepas sehingga orang tua terbebas dari pemberian nafkah. Dan bagaimana karakteristik kedewasaan seseorang jika dilihat dari berbagai sudut pandang.

¹² Ahmad syamsul Huda, *Analisis Pendapat Imam Al-Mardawy Tentang Nafkah Orang Tua Terhadap Anak yang Sudah Dewasa*, (Skripsi Universitas Islam Negri Walisongo, Fakultas syari'ah dan Hukum, 2017).

Kedua, Skripsi yang di susun oleh Ardani Mahendra, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan Anak-anak di tinjau dari UU no. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak (Studi Kasus pada Tuna Wisma di kota Bengkulu)”. Hasil dari penelitiannya adalah: didalam Pasal 1 ayat (a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dikatakan bahwa, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Dalam Pasal 28 b ayat 2 Undang-undang 1945 menyatakan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh suryanto, Fakultas syari’ah universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqah Al-Ma’isyah Anak yang

¹³ Ardian Mahendra, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anank-anak ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak* Studi Kasus Pada Tuna wisma di kota Bengkulu, (Skripsi Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, 2004).

Sudah Menikah” dari sekripsi ini dapat di ambil kesimpulan, Pada hakekatnya nafkah itu memang wajib terhadap keluarga. Khususnya masalah nafkah terhadap anak yang sudah menikah yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri itu merupakan sebuah hak bagi orang tua untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang sudah menikah itu, akan tetapi anak tersebut belum mampu secara ekonomi.¹⁴

Keempat, di tulis oleh Marwan pada Jurnal Futura yang berjudul “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari’ah”. Di dalam jurnal ini di jelaskan bahwa “berdiri sendiri” dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memiliki dua eksplikasi: Pertama, memiliki keahlian sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, memperoleh pendidikan yang membuatnya mencapai fitrah manusia. Kedua makna ini menjadi dasar untuk menetapkan batas usia secara konkrit berdasarkan realitas sosial yang ada sekarang ini.¹⁵

¹⁴ Suryanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqah Al-Ma'isyah Anak yang Sudah Menikah*, (Skripsi fakultas Syari'ah, Universitas Uslam Negri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

¹⁵ Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah*, (jurnal ilmiah Islam Futura IAIN Al-Raniry Banda aceh, 2014).

E. Kerangka Teori

Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskan untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala fikih adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syrai'atkan kepada hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan manusia dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah mereka. Maka fikih datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya. Begitupula dalam hal kedewasaan atau baligh yang diatur dalam fikih. Sebab dengan masuknya masa baligh anak sudah dibebankan kewajiban-kewajiban tanggung jawab yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut sebagian fuqahâ, ketentuan *bâligh* maupun dewasa bukanlah persoalan yang di jadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Mâlik, Imam Syâfi'i dan Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih

perawan (Belum *bâligh*), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada.¹⁶

Menyimak dari landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia *bâligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa.¹⁷

Ulama madzhab fikih sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti *bâligh*nya seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. *Imâmiyah, Mâliki, Syâfi'i dan Hambali* mengatakan: Tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak

¹⁶ Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kîtâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Bairut: Dâr al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 161.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 82

laki-laki 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun.¹⁸

Pandangan Hanafiyah dalam hal usia baligh diatas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimal 12 tahun untuk laki-laki, dan 9 tahun untuk perempuan. Sebab, pada usia tersebut, seorang anak laki-laki dapat mimpi basah mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil, atau haid.

Apabila dianalisis, pendapat Hanafiyah tampaknya didasarkan pada logika semata bahwa secara tertulis hadis tersebut menyatakan 15 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun batas minimal adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Dengan demikian, usia maksimum adalah 15 tahun bagi keduanya apabila ingin melangsungkan pernikahan.

Imâmiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki 15 tahun, sedangkan anak perempuan 9 tahun, berdasarkan hadits Ibnu Sina berikut:

¹⁸ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan* di dalam Kitab, *Al-Mughni*, Jilid 4. Hlm. 26

“Apabila anak perempuan telah mencapai 9 tahun, hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh”.

Berdasarkan hadits diatas. Imamiyah menetapkan standar usia baligh adalah 15 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Tidak ada penafsiran usia maksimum dan minimum baik laki-laki maupun perempuan. Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut *fase bâligh*, pada usia ini anak-anak telah memiliki kesadaran penuh untuk dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan social. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-Ghazâli sebagai *fase ‘aqil*, dimana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.¹⁹

¹⁹ Abdul Mujib, Jusif Mudzkir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 106.

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F.J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun. Dapat disimpulkan bahwa usia remaja berada pada rentang usia kurang lebih 12-21 tahun untuk wanita dan kurang lebih 13-22 tahun untuk pria.²⁰

Secara empiris dan sejalan dengan perubahan hukum di masing-masing Negara, terutama dalam wacana modern, batas minimal menikah ini memiliki perbedaan tiap-tiap Negara. Meskipun secara garis besar, usia *bâligh* untuk menikah berkisar antar umur 15-21 tahun.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan

²⁰ A.Tafsir et.al,Cakrawala,hlm. 75-76.

²¹ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 27.

diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah maka jenis penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang mengkaji suatu dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan berupa pendapat para ahli. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literature-literatur penunjang yang menggunakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif

yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan secara apa adanya.²² Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²³ Lebih jelasnya penulis menggunakan sumber data berupa data sekunder yang berasal dari ayat-ayat al-qur'an, dan hadits serta referensi khusus yang berkenaan dengan baligh atau dewasa baik itu dari buku kitab maupun, referensi umum seperti kajian hukum islam dan perundang-undang, lalu mengkaitkan dengan batas-batas usia anak dimana orang tua bebas dalam pemberian nafkah,

²² Tajul rifin, *Metode Penelitian, cet-1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2008), hlm. 119

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2002), Cet. 12, hlm. 107.

kemudian menyusunnya berdasarkan kronologis serta mengkritisnya menggali jawaban sehingga diketahui pengklasifikasiannya. Apakah status baligh atau dewasa yang berbeda-beda ini memiliki kekuatan untuk membantu dalam menjawab dilema dimasyarakat. Dan mempermudah orang tua dalam mengenal tugasnya bila di kaitkan dengan kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat taat pada hukum seperti hukum perundang-undangan, dan putusan hakim. Penulis menggunakan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat 1 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1, KUH Pidana, KUH Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 53 K/SIP/152 tanggal 1 juni 1955.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau hasil yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrument untuk mengatur variable, akan tetapi peneliti mencari dan belajar subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk

mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁴ Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), Kitab-kitab, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Teknik yang penulis gunakan adalah dengan wawancara yakni merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara dilakukan bertujuan mencatat opini yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Dengan melakukan interview, peneliti

²⁴ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm.47

dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami melalui bahasa dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Wawancara yang penulis lakukan dengan wawancara terstruktur, penulis telah menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, Kamera foto melalui rekaman suara.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵ Dalam penelitian data penulis mengungkap masalah status baligh dalam hukum Islam dan hukum positif terkait dengan kewajiban orang tua dalam menafkahi anak. Penulis menggunakan teknik analisis data secara *deskriptif analisis* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan

²⁵ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai pengesahan judul, Latar Belakang, rumusan masalah, tujuam penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DEFINISI BALIGH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang konsep baligh menurut hukum Islam, pengertian Baligh, dasar hukum dan

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

tanggung jawab anak yang sudah baligh, konsep baligh menurut hukum positif.

BAB III HUBUNGAN USIA BALIGH TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMBERIAN NAFKAH

Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang kaitannya usia baligh dengan kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah menurut hukum Islam dan hukum Positif. Apa pengaruhnya memberikan nafkah untuk perkembangan anak yang sudah dewasa.

BAB IV ANALISIS STATUS USIA BALIGH MENURUT HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMBERIAN NAFKAH

Bab ini akan menjelaskan tentang paparan dan analisis yang diperoleh dari rumusan masalah. Dimana dalam hal ini paparan dari analisis tersebut adalah analisis status baligh menurut hukum Islam dan

hukum Positif, analisis kaitannya usia baligh terhadap kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah. Dan Upaya apa saja yang sudah dihasilkan dalam hukum Islam dan hukum positif untuk menyeragamkan usia baligh di Indonesia. Selanjutnya bentuk kemandirian dalam hukum bagi anak yang telah baligh, menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Dan usia baligh yang dianggap sudah mandiri serta dilepas oleh orang tua.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, daftar pustaka dan lampiran yang dikemukakan didepan. Disini juga akan ada beberapa saran yang berhubungan dengan topic pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

DEFINISI BALIGH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Baligh Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Baligh

Didalam kamus Al-Bisri Indonesia Arab **بَالِغٌ** ,
رَجُلٌ بَالِغٌ , **الرَّاشِدُ** , **الرُّشْدُ** artinya dewasa, sedangkan
artinya orang dewasa.²⁷

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti sampai umur atau akil baligh, sedangkan kedewasaan adalah hal atau keadaan telah dewasa, pendewasaan yaitu perihal yang menjadikan dewasa.²⁸

Secara etimologi, istilah dewasa (*adult*) berasal dari bahasa latin, bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti “telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna (*grown to full size*)

²⁷ Munawwir & Abib Bisri, *Kamus Al-Bisri Indonesia-ARAB Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm . 62.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 350

and strength)” atau “telah menjadi dewasa (*matured*)”.²⁹

Dalam bahasa Belanda, dewasa diartikan sebagai “*volwas ‘sen*”, *vol* artinya penuh³⁰ *was’sen* artinya tumbuh,³¹ sehingga *volwasen* berarti “sudah tumbuh dengan penuh, selesai tumbuh dewasa”.³² Dengan pengertian tersebut, maka orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan baru dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya.

Akil baligh adalah istilah agama yang mengaitkan pubertas dengan kewajiban seseorang kepada sang pencipta atas perubahan yang terjadi pada dirinya.³³ “*Akil*” berasal dari bahasa Arab “*’Āqil*” (ism fa’il dari kata kerja ‘*aqala*) yang bermakna orang yang cakap, cerdas atau pintar, isim masdarnya “*aqlun*” yang berarti akal. Remaja yang pintar, cakap dan sudah

²⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology A Life Span Approach*, Mc. Graw Hil Book, (New York, 1980), hlm. 265.

³⁰ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoves, 1990), hlm. 761.

³¹ *Ibid*, hlm. 786

³² *Ibid*, hlm. 764

³³ Nonon, mursyidah dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm . 7

mampu menentukan pilihan terhadap sesuatu yang dianggap baik, disebut akil. Menurut hukum Islam seseorang dapat dikatakan akil apabila mampu mengetahui, memahami, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka harus dalam kondisi sadar dengan sempurna tanpa tekanan, mereka bukan anak kecil, juga bukan lansia yang mengalami kelemahan mengingat, tidak sedang tidur, tidak sedang mabuk atau gila.³⁴

“*Baligh*” juga berasal dari bahasa arab, isim fa’il dari kata بُلُوغ (Bulûgh) yang memiliki arti “sampai”, maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Sedangkan menurut makna terminologis, *al-bulûgh* adalah berakhirnya masa kanak-kanak (dalam pandangan fikih islam). Baligh adalah apabila telah mencapai usia 15 tahun ke atas atau sudah mengalami haid bagi perempuan meskipun usianya kurang dari 15 tahun. “*Akil Baligh*” adalah dua kata dengan makna berbeda tetapi keduanya merupakan ciri yang digunakan untuk menunjukkan seseorang terikat kewajiban mentaati hukum atau dengan kata lain disebut *mukallaf*.

³⁴ *Ibid*, hlm. 8

Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa Akil baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (taklif) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. Orang yang akil baligh disebut mukalaf. Sang mukalaf harus dapat memahami dalil *taklif* (pembebanan), yakni ia harus memahami nash-nash hukum yang dibebankan Al-Qur'an dan Al-Sunnah baik yang langsung maupun yang melalui perantara. Sebab orang yang tidak mampu memahami dalil taklif tidak akan dapat mengikuti apa yang dibebankan kepadanya dan tidak akan memahami maksudnya. Sedangkan kemampuan memahami dalil itu hanya diperoleh dengan akal, dan dengan adanya nash-nash yang dibebankan kepada orang-orang yang mempunyai akal itu dapat diterima pemahamannya oleh akal mereka. Namun karena akal itu merupakan hal yang tersembunyi yang tidak bisa diindrawi secara lahiriyah, maka syari' telah menghubungkan beban (taklif) dengan hal yang nyata yang dapat dijangkau oleh indra, yang menjadi asumsi bagi akal, yakni kedewasaan.

Maka barang siapa yang telah mencapai kedewasaan tanpa merusak kekuatan akalnya, berarti

telah sempurna padanya kemampuan untuk diberi beban. Karena tidak adanya akal yang menjadi alat untuk memahami apa yang dibebankan. Demikian pula orang yang lupa, tidur, mabuk. Mereka tidak dikenakan beban, karena ketika mereka dalam keadaan lupa, tidur, mabuk tidak memiliki kemampuan untuk memahami.

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. Bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْغَائِبِ حَتَّى يَجْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

Artinya: “Diangkatlah pena itu (tidak dicatat amal perbuatan manusia) dari tiga orang: Orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal”.

Bāligh dalam hukum Islam yang di pakai adalah:

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Gambaran umum Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam dapat dikatakan sampai sekarang telah terjadi perubahan hukum Islam dari masa kemasa sejak dari Turki sampai Indonesia, saling menginduk kepada hukum Islam sampai Negara tersebut memiliki Undang-undang tersendiri,

salah satunya adalah pembatasan usia *baligh*. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Islam di dunia Islam asas penting yang diusung adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani dan rohani. Di Indonesia batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tetapi sesuai dengan kebijakan yang baru undang-undang perkawinan ini telah diperbarui wanita menjadi 18 tahun.

2) Kompilasi Hukum Islam.

Parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan bertindak menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam diterbitkan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang dibuat sebagai upaya untuk persamaan hukum Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan peraturan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Kompilasi Hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis, dan bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan Presiden dan seterusnya. Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun diluar pengadilan.³⁵

Dalam kaitannya dengan kedewasaan, Kompilasi Hukum Islam juga menentukan batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun:

“Mengenai batas umur dewasa yang mewajibkan orang tua untuk melakukan pemeliharaan, Pasal 98 ayat 1 Kompilasi menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik

³⁵ A Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia)” *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm.152-153.

maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan Pasal 47 Undang-undang Perkawinan, yang menentukan anak yang belum dewasa belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”³⁶

2. Ciri-ciri Kedewasaan Menurut Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikatakan dewasa ada pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya. Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil baligh.

³⁶ Abdurrahman . *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2004), hlm.55.

(فُضِّلَ) عِلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ: تَمَامُ خَمْسَ عَشَرَ دَسَنَةً فِي الذَّكَرِ وَ أ

لَا نُتَى , وَ الْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَ لَا نُتَى لِتِسْعِ سِنِينَ , وَ الْحَيْضُ فِي أ

لَا نُتَى لِتِسْعِ سِنِينَ.³⁷

Artinya: Tanda-tanda baligh itu ada 3: Sudah genap umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sudah mimpi keluar seperma (mani) bagi laki-laki dan perempuan, apabila sudah berumur 9 tahun. Sudah haid bagi wanita, apabila sudah brumur 9 tahun.³⁸

Dalam kitab Kasyifatus Saja, Syaikh Nawawi Al-Bantani secara singkat padat memaparkan penjelasan ketiga tanda tersebut sebagai berikut:

1. Sempurnanya umur lima belas tahun berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perhitungan kalender hijriah atau qamariyah. Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur lima belas tahun ia telah dianggap baligh meskipun

³⁷ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Kaasyifatus Sajaa*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2008), hlm. 75

³⁸ Syekh Salim bin Sumair Al-Hadhram, *Terjemah Safinatun Najah Fiqih Islam Tingkat Menengah Penerjemah Susanto*, (Surabaya: Al-Miftah, 2012), hlm. 20.

sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda baligh yang lain.

2. Tanda baligh kedua adalah keluarnya sperma (*ihtilaam*) setelah usia Sembilan tahun secara pasti menurut kalender hijriah meskipun tidak benar-benar mengeluarkan sperma, seperti merasa akan keluar sperma namun kemudian ia tahan sehingga tidak jadi keluar. Keluarnya sperma ini menjadi tiga tanda baligh baik bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan, baik keluar pada waktu tidur ataupun terjaga, keluar dengan cara bersetubuh (*jima'*) atau lainnya, melalui jalannya yang biasa ataupun jalan lainnya karena tersumbatnya jalan yang biasa.
3. Adapun haid atau menstruasi menjadi tanda baligh hanya bagi seorang perempuan, tidak bagi seorang laki-laki. Ini terjadi bila umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia 9 (Sembilan) tahun secara perkiraan, bukan secara pasti, dimana kekurangan umur Sembilan tahunnya kurang dari 16 (enam belas) hari menurut kalender hijriah. Bila ada seorang anak yang hamil pada usia tersebut, maka tanda

balignya bukan dari tanda kehamilannya tetapi dari keluarnya sperma sebelum hamil.³⁹

Dalam Islam, istilah “dewasa” terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya pada surat al-Nûr ayat [24] : 59, Allah berfirman:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Dan apabila anak-anakmu telah dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin, juga sebagaimana meminta izinnya orang-orang telah terdahulu tadi. Bukankah Allah telah menjelaskan ayat-ayat-Nya untuk kamu; dan Allah adalah maha Mengetahui dan Maha bijak sana. (Q.s. an-Nûr ayat [24] : 59).⁴⁰

Makna firman Allah tersebut adalah, anak-anak diperintahkan untuk meminta izin pada ketiga waktu yang telah disebutkan, namun mereka boleh tidak meminta izin pada waktu lainnya. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan jika mereka sudah baligh, maka mereka sama dengan kaum laki-laki (lainnya) dalam hal

³⁹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Kaasyifatussajaa*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2008), hlm. 75-76.

⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 6 Dalam Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 327

wajib meminta izin setiap waktu. Ini adalah penjelasan dari Allah Azza wa Jalla tentang masalah hukum, halal dan haram.

Di Aceh, Mandahiling, dan Minangkabau ayat ini telah menjadi kebudayaan dan masuk ke dalam adat-istiadat umat Islam. anak-anak muda tidak tidur dirumah ibu bapaknya. Mereka pergi ke Meunasah atau surau dan langgar. Pulangnya pagi-pagi untuk menolong ibu bapaknya ke sawah dan ladang. Pemuda yang masih duduk-duduk di rumah pada waktu yang tidak pantas (terutama tergelek lohor, ketika istirahat) amat tercela dalam pandangan masyarakat kampungnya. Seorang saudara laki-laki atau mamak yang akan datang ke rumah saudara perempuan atau keponakan, dari jauh-jauh sudah berteriak memanggil anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah supaya seisi rumah tahu dia datang, dan yang sedang tidak memakai bajunya segera dia berpakaian yang pantas. Sedangkan kepada saudara dan mamak atau paman lagi juga seperti itu, apalagi terhadap orang lain.⁴¹

Dalam Surat an-Nisâ [4]: 6 yang berbunyi:

⁴¹ *Ibid*, hlm. 330-331

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
 رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
 أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
 عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah

Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”(Q.s. An- Nisâ [4]: 6)⁴²

Dalam *Tafsir Ayat al-Ahkâm* bahwa seorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah *baligh*, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau *haidh* maka itulah batasan *baligh*.⁴³

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*balîgh al-nikâh*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah.

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Dipomogoro, 2010 Ilmu), hlm. 143.

⁴³ Muhammad Alî al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, (Beyrut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1999). hlm. 153.

Kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hûdûd*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan.⁴⁴ Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh atau tidak berpengetahuan dalam agama.⁴⁵

Para ulama telah sepakat bahwa *ihtilam* merupakan tanda kedewasaan bagi anak laki-laki dan perempuan. Al-Hafidz Ibnu Hajar *rahimakhullah* berkata:

وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء
يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام.

Artinya: “ Para ulama telah sepakat/ijma’ bahwasannya *ihtilam* pada laki-laki dan perempuan mewajibkan dengannya (untuk diberlakukannya) ibadah, huduud, dan seluruh perkara hukum.”⁴⁶

⁴⁴ Dedi Supriyadi & Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Pustaka Al Fikri, 2009), hlm. 22

⁴⁵ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 9.

⁴⁶ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari*, Juz 5, hlm. 277

Tanda-tanda baligh untuk laki-laki diantara:

- 1) *Ihtilam*, menurut Imam Malik, *baligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur. Dasar hukumnya dalam firman Allah *ta'ala* (Q.s. An-Nuur : 59).
- 2) Tumbuhnya Rambut Kemaluan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. *Madzhab Hanafiyyah* berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan bukan merupakan tanda balig secara mutlak.⁴⁷ *Madzhab Hanabilah* dan satu riwayat dari Abu Yusuf dari *Madzhab Hanafiyyah* berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda *baligh* secara mutlak.⁴⁸

Madzhab Malikiyyah terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak, dan inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab maliki, Pendapat kedua mengatakan bahwa ia merupakan tanda baligh

⁴⁷ Abi Said, *Roddul Muhktar*, Juz 5 hlm.97

⁴⁸ Al Nakho'i, *Al-Muharror*, Juz 5, hlm. 277

yang menyangkut hak-hak anak Adam dalam beberapa hukum seperti *qadzaf* (menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina), potong tangan, dan pembunuhan. Adapun yang menyangkut hak-hak kepada Allah *ta'ala*, maka ia bukan sebagai tanda baligh.

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh untuk orang kafir. Adapun bagi muslimin, maka mereka berbeda pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa ia merupakan tanda baligh sebagaimana orang kafir, dan pendapat lain yang shahih dalam madzhab mengatakan bahwa itu bukan tanda baligh.⁴⁹

Pendapat yang rajih dari keempat madzhab tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda baligh secara mutlak bagi muslim atau kafir, baik menyangkut hak Allah atau hak anak Adam. Adapun dalil yang dijadikan hujjah antara lain adalah:

⁴⁹ Ali bin Abi Yusuf Asy-Syayrozi, *Al-Muhazzab*, Juz 1, hlm. 337-338.

a) Dari ‘Athiyyah, ia berkata:

عر ضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قر

أنبت قتل ومن لم ينبت خلي يظلة فكان من

سبيله فكننت ممن لم ينبت فخلي سبيلي

Artinya: “*Kami dihadapkan kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam pada hari Quraidhah (peristiwa pengkhianatan Bani Quraidhah), di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan*” (HR. At-Tirmidzi)

b) Dari Samurah bin Jundub bahwasannya

Nabi Muhammad SAW bersabda:

اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم

Artinya: “*Bunuhlah orang-orang tua dari kalangan kaum musyrik dan biarkanlah syark*”. (HR. Abu Dawud). Syark adalah anak-anak yang belum tumbuh bulu kemaluannya.

3) Mencapai usia tertentu

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Diantara pendapat-pendapat tersebut antara lain:

- a) Madzhab Syafi'iyyah, dan Hanabilah serta satu riwayat dari Abu Hanifah Yaitu lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan. Delapan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan.
- b) Madzhab Malikiyyah, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan delapan belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, sembilan belas tahun, tujuh belas tahun, dan enam belas tahun.
- c) Ibnu Hazm berpendapat sembilan belas tahun. Dalil yang dianggap paling *shahih* dan *sharih* oleh ulama yang memberikan batasan usia oleh pendapat pertama (lima belas tahun). dari Ibnu 'Umar *radliyallaahu 'anhuma*, ia berkata:

Yang Artinya:

"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta

dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku”.

Naafi’ berkata: “ Aku datang kepada ‘Umar bin ‘Abdil-’Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu akau beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudian ia berkata: ‘Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar’. Maka ‘Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun, sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang”. (HR. Al-Bukhari).

Namun, hadits ini pun tidak menunjukkan secara sharih bahwa usia lima belas tahun adalah batas usia baligh. Hadits ini masih mengandung kemungkinan bahwa pelarangan Nabi *shallallahu’alaihi’ wa sallam* bukan karena faktor baligh, namun karena

masih kecilnya Ibnu ‘Umar sehingga tidak dipandang mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk berperang. Ini terlihat dari ijthad ‘Umar bin ‘Abdul-‘Aziz yang hanya menandakan usia tersebut sebagai batas besar dan kecil untuk ikut berperang. Bukan baligh dan tidak baligh.

Pendapat yang rajih dalam permasalahan ini adalah tidak ada batasan usia tertentu untuk baligh. Dan inilah pendapat yang diikutkan Ibnu Al Qayyim *rahimahullah*, dimana beliau berkata:

Artinya: “ *Untuk waktu ihtilaam tidak ada batas usianya, bahkan anak-anak yang berusia dua belas tahun bisa ihtilaam. Ada juga yang lima belas tahun, enam belas tahun, dan seterusnya namun belum ihtilaam* ”

Kemudian beliau melanjutkan:

وقال داود وأصحابه لا حد له بال إنما هو

الا حتماً وهذا قول قوي

Artinya: *“Dawud (Adh-Dhahiriyy) dan sahabat-sahabatnya berkata: ‘Tida k ada batasan tertentu untuk usia balig. Batas yang benar hanyalah ihtilaam’. Ini adalah pendapat yang kuat”*.⁵⁰

Tanda-tanda Balig untuk perempuan diantaranya:

Adapun tanda balignya anak perempuan bisa seperti laki-laki, namun ditambah dengan keempatnya, yaitu haidl, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, serta membesarnya buah dada. Para ulama telah *ijma’* bahwasannya haidl merupakan tanda balig bagi seorang wanita. Al-Haafidh berkata:

وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء.^{٤٩}

Artinya: *“Para ulama telah sepakat/ijma’ bahwasannya haid merupakan tanda balig bagi wanita”*.⁵¹

Batas usia balig bagi anak laki-laki dan perempuan adalah *ihtilam*. Khusus bagi anak perempuan, atau ia telah mengalami haidl. Namun

⁵⁰ Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol 15 No.2 Oktober 2016.hlm. 266-268.

⁵¹ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari*, Juz 5, hlm. 277

apabila ia sulit mengetahui apakah orang tersebut telah *ihtilam* (atau bagi anak perempuan ia terlambat haidl atau bahkan tidak mengalami haidl sama sekali), maka tanda balighnya diambil dari tumbuhnya rambut kemaluan.

Bila anak sudah mengalami salah satu tanda diatas, maka ia telah baligh yang dengan itu ia telah sampai pada usia *taklif*. Wajib baginya mengerjakan ibadah dan seluruh amalan wajib. Adapun sebelum itu, maka perintah hanyalah sebagai pembiasaan dan menjadikannya suka.⁵²

B. Konsep Baligh Menurut Hukum Positif

Aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 330 KUH Perdata, Usia 21 tahun atau sudah menikah
2. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang perlindungan anak, 18 tahun

⁵² Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol 15 No.2 Oktober 2016. hlm. 269.

3. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan Anak yakni usia 21 tahun
4. Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni usia 18 tahun untuk menghadap dan 18 tahun untuk saksi.
5. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan, 18 tahun
6. Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Pemasyarakatan, 18 tahun
7. Pasal 1, UU tentang Pengadilan Anak, 18 tahun
8. Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, 18 tahun
9. Pasal 1 ayat (4), Undang-Undang tentang Pornografi, 18 tahun
10. Pasal 4, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun
11. Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 18 tahun.

1) Dewasa menurut hukum positif Indonesia

a) Menurut Konsep Hukum Perdata

Dalam hal seseorang yang dianggap belum dewasa menginginkan dipersamakan dengan orang yang telah dewasa agar dapat bertindak sendiri dalam

hukum, kitab Undang-undang Hukum Perdata menyediakan lembaga pendewasaan (*handlichting*), dengan cara mengajukan kepada Presiden atau Pengadilan Negri sesuai ketentuan dalam Pasal 421 atau Pasal 426 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Mengenai pendewasaan, Profesor Subekti S.H., berpendapat bahwa:

*“Pendewasaan” (hadlichting) ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.”*⁵³

Dalam Pasal 419 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dirumuskan mengenai upaya pendewasaan:

“dengan melakukan pendewasaan, seorang anak belum dewasa boleh dinyatakan dewasa atau bolehlah diberikan kepadanya hak kedewasaan yang tertentu”.

⁵³ Subekti R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 55

Dalam ketentuan Pasal 424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Jika namun itu ia hendak mengikat diri dalam perkawinan, maka tetaplah ia menurut pasal 35 dan 37 berwajib memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya atau dari kakek-neneknya atau dari Pengadilan Negeri sebelum ia mencapai umur genap dua puluh satu tahun, sedangkan terhadap anak luar kawin yang telah diakui, tetaplah berlaku pasal 39 ayat kesatu, sampai mereka mencapai umur genap dua puluh satu tahun.”

Profesor Wahyono Darmabrata, SH. MH., mendefinisikan Pendewasaan adalah sebagai berikut:

*“Pendewasaan atau *handlichting* ialah suatu cara atau upaya hukum untuk memberikan pada anak yang masih dibawah umur suatu kedudukan*

hukum sama seperti anak yang sudah cukup umur atau sudah dewasa”.⁵⁴

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 2 (dua) macam pendewasaan, yaitu:

1. Pendewasaan Penuh (lengkap)

Pendewasaan penuh (lengkap), dapat diajukan kepada Presiden RI Menteri dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia setelah mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan tersebut setelah mendengarkan keterangan dari kedua orang tua dari anak tersebut, atau walinya bilamana anak tersebut dibawah perwalian. Pendewasaan Penuh (lengkap) bilamana telah diperoleh tidak dapat dicabut kembali walaupun bilamana dicabut sebelum usia 21 tahun.

2. Pendewasaan Terbatas

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan

⁵⁴ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata* 2, (Depok : Oktober 2006). hlm.144.

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya bila mana si anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Pendewasaan terbatas dapat dicabut kembali oleh Pengadilan Negeri jika dianggap terdapat cukup alasan bahwa Pendewasaan Terbatas tersebut disalahgunakan dan dapat dimohonkan oleh orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa tersebut.

Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata).

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut penulis melihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan kepada hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang yang menyatakan

bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat dari pada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Bila hakim berpendapat seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa dicabut oleh hakim.

b) Menurut Konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Secara nasional anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak

adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.⁵⁵

Dalam hukum pidana usia dewasa adalah 18 tahun. Ketentuan ini dapat disimpulkan berdasarkan pasal 45 dan 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa mereka yang belum cukup umur (*minderjaring*) adalah yang belum berusia 18 tahun (16 tahun di tambah 2 tahun) dan ada pengaturan khusus tentang pengurangan maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.

Jika di bandingkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak maka anak yang disebut anak adalah “Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁵⁶

Usia dewasa dalam Hukum Pidana adalah mereka yang telah memasuki usia 18 tahun,

⁵⁵ Ahmad Kami dan H.M, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 378

⁵⁶ Ibid, hlm. 378

sedangkan jika cakap hukum, artinya seseorang dapat di ancam hukum pidana Indonesia adalah seseorang yang telah berumur 18 tahun dan memang sehat akal pikirannya. Tentu ada syarat-syarat lain, namun yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang telah berusia 18 tahun maka tidak ada perlakuan-perlakuan khusus jika dia melakukan tindak pidana. Mereka yang telah berumur 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana jika melakukan perbuatan pidana. Adapun sanksi tersebut dapat berupa:

1. Pidana Pokok

- (a) Pidana Mati
- (b) Pidana Penjara
- (c) Kurungan
- (d) Denda

2. Pidana Tambahan

- (a) Pencabutan hak-hak tertentu
- (b) Perampasan barang-barang tertentu
- (c) Pengumuman putusan hakim.⁵⁷

⁵⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 5-6.

Berbeda dengan seorang yang belum berumur 18 tahun maka di sebut anak. Bagi anak yang melakukan perbuatan pidana atau disebut “*anak nakal*” maka diatur dalam ketentuan khusus yang disebut dengan Undang-undang Momor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sanksi bagi anak nakal adalah:

- 1) Dikembalikan kepada orang tua;
- 2) Diserahkan kepada Negara;
- 3) Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan.⁵⁸

Beberapa Negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris pertanggung jawaban pidana diberikan kepada anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikut sertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 tahun. Di negara Inggris definisi usia anak dari nol sampai 18 tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat

⁵⁸ Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 28-29.

perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*Skill*) dan kompetensi yang menuju pada kemandirian pada saat dewasa (*adulthood*). Di negara Amerika Serikat yaitu New York dan Vermont seseorang yang masih belum mencapai umur 16 tahun masih di rujuk ke pengadilan anak. Di negara Skotlandia anak adalah seseorang berusia 7 tahun sampai 15 tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. Di Australia Selatan anak usia 8 tahun sampai 18 tahun dan di Canada seseorang berumur dibawah 12 tahun.⁵⁹ Yang berumur 17 dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak. Sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinan telah diputus, ia tidak kembali menjadi “belum cukup umur”.

⁵⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 34-35.

- c) Menurut Konsep Hukum Adat sebagai norma-norma hukum yang hidup di masyarakat (*Living law*).

Sedangkan jika ditelisik dari parameter usia dewasa yang mengandung kewenangan menurut konsep hukum adat. Dalam sebuah temuan pada situs internet, mengenai kedewasaan menurut konsep hukum adat adalah sebagai berikut:

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fisik seperti hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja (terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja tidak secara tetap atau rutin istilah lain sewaktu-waktu). Berhubung yang di anggap dewasa bila umur dan perkembangan jiwanya harus pantas dianggap cakap atau tidak cakap, maupun atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan tertentu pula. Artinya apakah ia dapat mempertimbangkan dan memelihara kepentingan sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu mempertimbangkan dan memelihara kepentingan

sendiri. Cakap artinya, mampu mempertimbangkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan mendapatkan anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.⁶⁰

Pada dasarnya hukum adat menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang sudah kuat gawe atau mampu untuk bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

⁶⁰ Diakses dari “*Konsultasi Hukum – Hukum Adat*,” <http://www.asiamaya/konsultasi_hukum/adat/inexhtm> 6 Juni 2008. Pada tanggal 12 mei 2019, Pukul: 21.14 WIB.

d) Menurut konsep Undang-Undang Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa, belum ada pengertiannya. Yang ada baru Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang mengatur tentang:

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2)
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1)
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuannya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Tetapi tidak ada keterangan yang mengatur tentang yang disebut belum dewasa dan dewasa dalam Undang-undang ini.

Kesimpulannya, usia dewasa di atur dalam berbagai pasal dan sebagainya yaitu:

- a. Pasal 338 KUH Perdata : 21 Tahun
- b. Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 : 18 Tahun
- c. Pasal 39 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 :
18 Tahun
- d. Yurisprudensi MA RI Tanggal 13 Oktober
Tahun 1976 No.477/K/Pdt : 18 Tahun
- e. Dalam Hukum Adat : Berdasarkan Pada
ukuran social bukan fisik atau regulasi.

C. Macam-macam Kedewasaan

Menurut Adolf Heuken SJ kedewasaan mempunyai berbagai arti yaitu: Kedewasaan jasmani, intelektual, emosional, sosial dan rohani.

a) Kedewasaan jasmani

Kedewasaan jasmani bukan berarti setiap pemuda atau gadis harus tinggi sekian senti atau berat sekian kilo. Seorang mungkin tinggi ramping, yang lain pendek

kokoh. Dan yang lain sedang saja. Tetapi mereka tumbuh normal secara jasmani pada umur yang sama.

b) Kedewasaan intelektual

Seseorang dikatakan dewasa secara intelektual apabila ia mampu berfikir secara matang dan logis, mempunyai pertimbangan tepat, dan memahami Allah, dunia serta diri sendiri.

c) Kedewasaan emosional

Kedewasaan emosional mempunyai segi rangkap yaitu segi positif dan segi negatif. Segi positif maksudnya, kita mampu mengungkapkan perasaan kita dengan tepat dalam situasi yang cocok dan terhadap hal serta orang yang semestinya. Sedangkan segi negatif yang dimaksud adalah apabila kita mampu mengendalikan perasaan kita sehingga dalam mengungkapkannya tidak mengganggu perkembangan kita atau melalui orang lain.

d) Kedewasaan sosial

Kedewasaan sosial mengandung implikasi yang lebih dari sekedar kemampuan bergaul luwes dengan orang dewasa, mudamudi serta orang-orang yang sebaya. Kedewasaan sosial mencakup tiga segi yaitu:

1. Mengetahui pilihan apa yang boleh diperbuat atau apa yang tidak boleh diperbuat dalam situasi yang berlainan.
2. Mengambil bagian dalam kegiatan bersama yang beraneka ragam, mempelajari keahlian untuk masing-masing kegiatan itu.
3. Akan tanggung jawab terhadap orang lain supaya dapat hidup bersama secara harmonis.

e) Kedewasaan rohani

Kedewasaan rohani berarti tidak lebih dari hanya melaksanakan semua hak hukum Tuhan dan menjalani kehidupan normal. Jauh lebih dari itu, kita dikatakan dewasa dari segi rohani jika kita menyadari bahwa roh Illahi berusaha dalam hati kita, mempersekutukan kita dengan Tuhan dan menggerakkan kemauan kita untuk melaksanakan yang baik.⁶¹

⁶¹ Sayyidatul Fadlilah, *Pendidikan Akhlak Anak Dalam Keluarga (Sebuah Kajian tentang Fungsi dan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak)* dalam SAWWA Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 4, Nomor 1, oktober 2010, hlm. 98-99.

Menurut E.B Hurlock dalam bukunya *Developmen Psycology* membagi masa dewasa menjadi tiga yaitu:

a) Masa Dewasa Dini

Masa dewasa awal dimulai dari usia 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.

b) Masa Dewasa Madya

Masa dewasa madya dimulai dari usia 40 tahun sampai kira-kira umur 60 tahun, yakni saat baik menurunnya kemampuan fisik dan psikologis yang jelas nampak pada setiap orang.

c) Masa Dewasa Lanjut (usia lanjut)

Masa ini dimulai dari usia 60 tahun sampai seseorang meninggal. Pada waktu ini baik kemampuan fisik maupun psikologis cepat menurun, tetapi teknik pengobatan modern serta upaya dalam hal berpakaian dan dandanan, memungkinkan pria dan wanita

berpenampilan, bertindak dan berperasaan seperti kala mereka masih lebih muda.⁶²

D. Ciri-ciri Karakteristik Kedewasaan Menurut Kematangan Emosional

Seorang Psikolog bernama Mare dan Angel mengemukakan bahwa kedewasaan seseorang bukanlah terletak pada ukuran usianya saja, tetapi juga pada sejauh mana tingkat kematangan emosional yang dimilikinya. Berikut ini pemikirannya tentang ciri-ciri atau karakteristik kedewasaan seseorang yang sesungguhnya dilihat dari kematangan emosionalnya di antaranya yaitu:⁶³

1. Tumbuhnya kesadaran bahwa kematangan bukanlah suatu keadaan tetapi merupakan sebuah proses berkelanjutan dan secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diri.
2. Memiliki kemampuan pengelolaan diri dari perasaan cemburu dan iri hati.
3. Memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan mengevaluasi pandang orang lain.

⁶² Abdul Wahib, *Psikologi Agama Pengantar Memahami Perilaku Beragama*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.104-105.

⁶³ Kematangan Emosional, Sumber dan terjemahan bebas diakses pada tanggal 19 April 2019 dari <http://www.marcandangel.com/2007/08/17/what-is-adulthood-20-defining-characteristics-of-a-true-adult>

4. Memiliki kemampuan memelihara kesabaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari.
5. Memiliki kemampuan menerima fakta bahwa seseorang tidak selamanya dapat menjadi pemenang dan mau belajar dari berbagai kesalahan dan kekeliruan atas berbagai hasil yang telah tercapai.
6. Tidak berusaha menganalisis secara berlebihan atas hasil-hasil negative yang diperbolehnya, tetapi justru dapat memandangnya sebagai hal yang positif tentang keberadaan dirinya.
7. Memiliki kemampuan membedakan antara pengambilan keputusan rasional dengan dorongan emosionalnya (*emotional impulse*).
8. Memahami bahwa tidak akan ada kecakapan atau kemampuan tanpa adanya tindakan persiapan.
9. Memiliki kemampuan mengelola kesabaran dan kemarahan.
10. Memiliki kemampuan menjaga perasaan orang lain dalam benaknya dan berusaha membatasi sikap egois.
11. Memiliki kemampuan membedakan antara kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*).

12. Memiliki kemampuan menampilkan keyakinan diri tanpa menunjukkan sikap arogan (sombong).
13. Memiliki kemampuan mengatasi sikap tekanan (*pressure*) dengan kesabaran.
14. Berusaha memperoleh kepemilikan (*ownership*) dan bertanggungjawab atas setiap tindakan pribadi.
15. Mengelola ketakutan diri (*manages personal fears*)
16. Dapat melihat berbagai “bayangan abu-abu” diantara ekstrem hitam dan putih dalam setiap situasi.
17. Memiliki kemampuan menerima umpan balik negative sebagai alat untuk perbaikan diri.
18. Memiliki kesadaran akan ketidakamanan diri dan harga diri.
19. Memiliki kemampuan memisahkan perasaan cinta dengan birahi sesaat.
20. Memahami bahwa komunikasi terbuka adalah kunci kemajuan.

Berdasarkan uraian di atas, pengertian kedewasaan dalam aspek psikologi ini, lebih pada perkembangan diri baik secara mental maupun emosional serta pengembangan sikap dalam pergaulan social, sehingga seseorang apabila sudah mencapai usia dewasa harus melakukan perbaikan-perbaikan pada diri sendiri maupun kepada orang lain.

E. Konsep Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam

1. Definisi Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁶⁴

Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, , يصلح , يصلح

صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁶⁵ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁶⁶

Secara umum dari pengertian di atas dapat difahami bahwa *masalah* dari segi bahasa ialah sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan karena manusia. Setiap kebaikan yang dikaitkan kepada

⁶⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

⁶⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

⁶⁶ Munawar Kholil, *op. cit.* hlm. 43

manusia dianggap *masalah* walaupun secara zaharinya ia tidak membawa kebaikan untuk manusia.

Menurut Ulama' Ushul Fiqh, ada beberapa macam definisi masalah Mursalah yang antara lain:

- a. Menurut Prof. DR. Abdul Wahhab Khalaf masalah mursalah adalah:

المصلحة المرسلة أي المرسلة أي المطلقة في اصطلاح

الاصول المصلحة التي لم يشرع حكما لتحقيقها،

ولم يدل دليل شرعي على إعتبارها أو إلغائها

“Maslahah Mursalah yaitu masalah dimana Syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya.”

- b. Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah, definisi Masalahah adalah sebagai berikut :

والمصلحة المرسلّة ا و الا ستسلاح هي المصلح

الملا عمة لمقا صد الشارع الاس مى ولا يشهد لها

اصل خاص بالا اعتبار والا لغاء

“Maslahah mursalah atau istilah adalah : segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya”

- c. Menurut DR. Muhammad Yusuf Musa, define Masalahah mursalah adalah sebagai berikut:

المصالح المرسلّة هي كل مصلحة غير مقيدة بنص من

الشارع بدعوى الر اعتبارها او عدم اعتبارها وفى

اعتبارها مع هذا جلب نفع او دفع ضرر

“Maslahah mursalah yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan Syari’ dengan mengakuinya atau menolaknya, akan tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.”

Dengan definisi tentang maslahah diatas, jika dilihat dari segi redaksi Nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan al-qur’an maupun al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Sedangkan kata maslahah menurut DR. Jalaluddin Abdur Rahman di artikan dengan melepaskan atau lepas dari pertimbangan syari’. Jadi Maslahah mursalah menurut beliau adalah adalah:

أما المصالح المرسلة فهي ما كانت خالية عن مثل هذا الشاهد

ولكنها في الوقت نفسه ملائمة لا اعتبارات الشارعية وجملية

مقاصده واحكامه

“Adapun yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu sesuatu yang sunyi dari semacam dalil, tetapi dalam suatu waktu, hal tersebut sesuai dengan ibarat-ibarat syari’ secara keseluruhan baik tujuan-tujuan atau hukumnya.”

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung masalah atau tidak, diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemanfaatan dan kemazdorotannya, dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari’at. Prof. DR. Abdul Wahhab Kholaf dalam bukunya *Ilmu Al-ushul Al-Fiqh* mengatakan bahwa para Ulama’ yang menjadikan hujjah masalah mursalah sangat berhati-hati, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari’at menurut hawa nafsu dan keinginan sendiri. Oleh karena itu masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-

hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-qur'an dan Al-hadits) serta Ijma' Ulama.⁶⁷

2. Landasan hukum Masalah Mursalah yakni Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”
(QS. Yunus : 57)

⁶⁷ Amin Farih ZA, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008). hlm. 19.

“Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-NYA, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-NYA itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yunus : 58)

Kemaslahatan dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Kemaslahatan dari wajibat (tindakan yang wajib).
2. Kemaslahatan dari mandubat (tindakan yang sunnah).
3. Kemaslahatan mubahat (tindakan yang jawaz).⁶⁸

⁶⁸ Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, Terjemahan dari Qawaa'idul Ahkaam fi Mashaalihi (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7

BAB III

HUBUNGAN USIA BALIGH TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMBERIAN NAFKAH

A. Hubungan Usia Baligh Terhadap Kewajiban Orang Tua dalam Pemberian Nafkah menurut Hukum Islam

Salah satu perubahan krusial yang dibawa Islam adalah fase perkembangan dan Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan.⁶⁹

1. Periode Penentuan Aqil Baligh Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, para ulama’ sepakat bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seseorang mukallaf adalah akal (العقل) dan pemahaman (الفهم). Seseorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila seseorang telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditunjukkan kepadanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syar’i. termaksud dalam kategori Ini orang

⁶⁹ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 25.

yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf, dan lupa, tidur, dan mabuk.⁷⁰

Selanjutnya, Ulama' Usul Fiqh memberi kesimpulan bahwa syarat seseorang itu dikenai taklif atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat dua syarat berupa:⁷¹

- a) Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif.

Ini dikarenakan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak memiliki akal dan tindak faham itu jelas tidak mungkin (محال).

Kemampuan memahami dan menentukan ide (الإدراك). Hanya saja akal itu adalah sebuah perkara

abstrak (الخفية). Maka al-Syâri' sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak

⁷⁰ Chaerul Umam, *Usul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.

⁷¹ Amir Syariffuddin, *Usul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Kencana,2014) hlm. 356-357

termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil taklif. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk.

- b) Seseorang telah mempunyai kecakapan hukum (أهلية)

Secara istilah *ahliyyah* didefinisikan sebagai kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi. Maka atas dasar ini para ulama membagi sifat *ahliyyah* menjadi dua jenis, yaitu:

Ahliyyah Wujub dan Ahliyyah Ada'. Penjelasan yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Definisi Ahliyyah Wujub adalah kepantasan menerima taklif, yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. Kecakapan semacam ini menurut ulama Fiqh "ذمة", yaitu suatu sifat yang secara hukum menjadikan seseorang dapat bertindak dan menerima kewajiban tertentu. Untuk

menentukannya adalah berdasarkan sifat kemanusiaannya (إنسانية) yang tidak dibatasi umur, baligh atau tidak, cerdas atau tidak. Semenjak seseorang dilahirkan dan hidup di dunia sampai meninggal dunia, ia telah memiliki sifat kecakapan ini. Kecakapan ini akan hilang apabila nyawanya hilang atau meninggal dunia. Para ulama usul fiqh membagi Ahliyah al-Wujub ini menjadi dua bagian:⁷²

1. *Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah* (أهلية (الوجوب الناقصة), yaitu ketika seseorang masih berada di dalam kandungan ibunya. Janin dianggap memiliki Ahliyyah al-Wujûb yang belum sempurna karena hak-hak yang harus diterimanya belum dapat menjadi miliknya secara sempurna sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat. Terdapat empat macam hak seseorang

⁷² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 211

janin yang masih di dalam kandungan ,
yaitu:

- a. Hak keturunan ayahnya.
- b. Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia.
- c. Wasiat yang ditunjukan kepadanya.
- d. Harta wakaf yang ditunjukan kepadanya.

2. *Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah* (أهلية الوجب الكاملة), yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan berakal walaupun masih kurang sempurna. Pada periode ini, seseorang telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kewajiban untuk menjaga harta orang tuanya, kewajiban agama yang berkaitan dengan harta seperti zakat, dan kewajiban membayar ganti rugi yang diambil dari hartanya apabila ia telah merusakkan harta orang lain.

3. *Ahliyyah al-Adda'*, yaitu orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah kepantasan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakan baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah memiliki akibat hukum. Kecakapan berbuat hukum terdiri dari tiga bagian yaitu:⁷³

- a) *Adim al-Ahliyah*, yaitu hal keadaan tidak cakap sama sekali, yakni manusia sejak lahir sampai mencapai umur tamyiz. Manusia dalam batas umur ini belum dituntut untuk melaksanakan hukum. Oleh karena itu ia tidak wajib untuk melaksanakan shalat, puasa dan lainnya. Dosamping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenakan hukum maka

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Kencana,2014), hlm. 359

semua akibat pelanggaran yang merugikan orang lain ditanggung oleh orang tua.

- b) *Ahliyyah al-Adda' al-Naqishah* (أهلية الأداء الناقصة), yaitu kecakapan berbuat hukum secara lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini maka sebagian tindakannya dikenakan hukum dan sebagian lagi tidak dikenakan hukum. Maka dalam hal ini setiap tindakan, perkataan dan perbuatan mempunyai akibat hukum antara lain:

1. Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya seperti menerima pemberian hibah dan wasiat, maka semua tindakan dalam hal ini dikatakan sah

tanpa harus persetujuan wali.

2. Tindakan yang semata-mata mengurangi hak yang ada padanya dengan pemberian yang dilakukan dalam bentuk hibah, sadaqah, pembebasan hutang jual beli atau sesuatu yang belum pantas, maka bentuk tindakan tersebut tidak sah.
3. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian umpama jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya. Maka tindakan yang dilakukan dalam bentuk ini tidak batal secara mutlak. Tindakan mumayiz dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah karena

ia cakap dalam melakukan ibadah, tetapi ia belum secara pasti karena ia belum dewasa.

- c) *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah* (أهلية الأداء الكاملة), yaitu kecakapan berbuat hukum secara sempurna. Yakni manusia yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan segala pembebanan hukum karena ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa syara' tidak bermaksud membebani manusia bila masih berada di luar batas kesanggupan untuk mengerjakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu segala hukum yang dibebankan terhadap mukallaf dimaksudkan hanya bagi seseorang yang telah sempurna dalam pandangan hukum. Yakni seseorang yang *aqil*

baligh dan cerdas. Hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan bagi mukallaf sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya orang yang dianggap belum mencapai *aqil baligh* tidak dituntut melainkan telah memiliki kecakapan secara fisik untuk melakukan berdasarkan batas umur baligh secara maklum.

Terhadap seseorang yang dinyatakan belum mencapai *aqil baligh*, hukum Islam masih memberikan kelonggaran. Sebagaimana yang disyariatkan oleh hadits yang menyatakan ketidak berdosaan (*raf'ul kalam*) seorang anak hingga mencapai *aqil baligh* yang ditandai dengan *Ihtilam* atau timbulnya mimpi berhubungan layaknya suami istri pada laki-laki dan haid pada perempuan.⁷⁴

2. Kriteria Cakap Hukum (Aqil Baligh)

Cakap hukum atau dalam Islam disebut *aqil baligh* merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh karena hal itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Usia baligh dalam

⁷⁴ Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, cet. Ke-1, (Bairut: Dar al-Fikr, T. th.), hlm. 11

perspektif ulama' fiqh yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak untuk menjadi seorang mukallaf tentunya hal itu tidak akan keluar dari konteks definisi usia baligh yang dimunculkan oleh Hadits dalam kitab hadits sendiri. Kesimpulan hukum itu tidak lepas dari konteks Hadits yang menjadi *istimbat* hukum para Ulama' mereka sebagai *marji'* kedua setelah al-Qur'an. Hal ini semakin jelas dengan adanya definisi usia baligh yang terdapat dalam Hadits Nabi di riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya menerangkan tentang batasan-batasan usia anak baligh maupun pra baligh. Berikut penjelasan tentang definisi tersebut:

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عَمْرِ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ
وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ
خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَاؤُنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدْ مِتُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ
بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَائِهِ أَنْ يَفَرَّ ضُؤَالِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ
عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ. وَحَدَّثَنَا .

أبو بكر ابن شيبه حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان
 وحدثنا محمد ابن مثنى حدثنا عبد الوهاب (يعنى الثقفى) جميعا عن
 عبيد الله بهذا الاسناد غير أن فى حد يثتهم و أنا ابن أربع عشرة سنة
 فا ستصغر نى. ٧٥

Artinya: Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah saw. Untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun tetapi Rasulullah Saw tidak memperkenankan diriku. Dan aku (pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasulullah SAW memperkenankan diriku. Nafi' menceritakan," lalu aku datang kepada Umar Ibnu Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadits ini, maka ia berkata, "sesungguhnya hal ini batas usia antara anak-anak dengan usia dewasa". Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai orang yang telah lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka dikategorikan sebagai anak-anak.⁷⁵

Selanjutnya keterangan hadits di atas dapat dipahami bahwa kriteria usia anak yang menentukan

⁷⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim, juz II*, (Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm.142

aqil baligh baik menurut ahli hadits maupun ahli fiqh secara esensial mempunyai satu pemahaman yang sama yaitu usia anak yang belum samapai pada umur lima belas tahun, karena dalam hadits di atas memandang bahwa umur lima belas tahun adalah umur pembatas antara anak-anak dan remaja (*baligh*).

Akan tetapi pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak dianggap *baligh* menurut ahli hadits dan ahli fiqh walau secara esensial memiliki pemahaman yang sama, secara sisi historis dan retorika terjadi perbedaan pandangan diantara para ulama'. Menurut jumhur ulama umur dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Abu hanifah umur dewasa bagi laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Maka bila seseorang belum mencapai umur tersebut maka belum berlaku beban hukum.

Secara lebih rinci, pembatasan usia *aqil baligh* menurut para ulama' adalah sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani

⁷⁶Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III, (Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn.), hlm.393

(*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan,⁷⁷ usia anak telah genap mencapai 15 tahun.

- 2) Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendahnya 12 tahun. Kriteria *baligh* bagi laki-laki yaitu *ihtilam* yaitu mimpi keluar air mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).⁷⁸
- 3) Menurut Imam Malik, batasan umur *bâligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun meskipun usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci lagi madzhab Malikiyyah memberikan kriteria *bâligh* ada 7 macam. Yang 5 (lima)

⁷⁷ Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaludin as Suyuthi, *Tafsir al Qur'an al Karim, Juz I*, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), hlm.98.

⁷⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *Al hami' li Ahkam al Qur'an Jilid V*, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn.), hlm.37

bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang dua macam khusus bagi perempuan.

Kriteria *bâligh* khusus bagi perempuan adalah haidh dan hamil. Sedangkan kriteria *bâligh* yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah:

- (a). Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga
- (b). Tumbuhnya rambut di sekitar organ intim
- (c). Tumbuhnya rambut di ketiak
- (d). Indra penciuman hidung menjadi peka
- (e). Perubahan pita suara.

Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria *bâligh* tersebut tidak muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

3. Implementasi Aqil Baligh Dalam Hukum Islam

Korelasi antara kriteria *aqil bâligh* setiap orang menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan praktik-praktik ibadah *mahdhah* maupun *ubudiah*,

ibadah yang terkait hubungannya antara manusia dengan Allah ataupun manusia dengan manusia lainnya. Karena dari segi *aqil bâligh* inilah selanjutnya dapat dijadikan suatu parameter apakah seseorang dapat dibebani tanggung jawab hukum seperti kewajiban shalat, zakat, haji, dan lainnya. Berangkat dari hal inilah yang kemudian menjadikan para ulama mengkaji dasar hukum al-Qur'an dan hadits untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai batas usia seseorang dapat dinyatakan baligh sehingga dapat dijadikan *hujjah* bagi kaum muslim.

Namun dalam penggalian hukum tersebut, setiap ulama' memiliki metode penggalian hukum (*istinbat*) yang berbeda-beda, maka factor inilah yang kemudian menjadikan perbedaan pendapat diantara kalangan ulama' dalam penentuan batas usia *aqil bâligh* seseorang untuk dapat dibebani suatu perkara atau tanggung jawab.

Dikaitkan lagi dengan kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah terhadap anak yang mana orang tua tidak lagi wajib menafkahi anak yang sudah *bâligh* di masyarakat pada umumnya juga memiliki persoalan ini. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten

dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara legal dianggap dewasa, akan tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. Tentu hal ini menjadi pemicu untuk banyak permasalahan yang lain misalnya saja dengan tolak ukur kewajiban orang tua.

4. Kaitannya Usia baligh dengan Kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah.

1) Pengertian orang tua

Orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa orang tua adalah ayah/ibu kandung atau orang yang dianggap tua (*cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya, orang-orang yang dihormati/disegani*). Dilihat dari pengertian di atas bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua adalah jelas. Pahala yang paling besar bagi orang tua adalah membina keluarga.

Sebegitu pedulinya agama mengatur kehidupan manusia, sehubungan dengan

kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah baligh dari perasaan psikologis di sini adalah menampakkan apa yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua berupa cinta, kasih dan sayang dan kelembutan kepada anak-anak mereka. Hikmah dari semua itu adalah menghilangkan kebiasaan jahiliyah dan terhadap anggapan buruk terhadap anak perempuan. Kemudian menanamkan keutamaan berupa pahala dan balasan bagi orang yang bersabar karena kehilangan anak, lalu apa tuntunan agama Islam bagi kedua orang tua manakala didapati pertentangan antara maslahat Islam dengan Maslahat anak.

Secara fitrah, kedua orang tua pada dasarnya mencintai anak. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa hati kedua orang tua sebenarnya secara fitrah mencintai anak dan tumbuh perasaan-perasaan dan kejiwaan dan cinta kasih seorang ayah untuk menjaganya, menyayangnya, melindunginya, dan memperhatikan urusannya. Orang tua tidak akan bersabar dalam menjaga anak-anak,

memberikan pengayoman, dan mendidiknya.⁷⁹

Tidak heran jika Al-Qur'an menggambarkan perasaan-perasaan kebapakan dengan penggambaran yang paling indah. Allah jadikan anak-anak itu terkadang sebagai hiasan kehidupan:

⁸⁰ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... ﴿٤٦﴾

Artinya: “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...*” (QS.Al- Kahfi [18]: 46)

Diibaratkan juga bahwa anak itu suatu nikmat yang agung yang harus disyukuri.

⁸¹ ...وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَتَفِيرًا ﴿٦﴾

Artinya: “*Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.*” (QS. Al-Isrâ' [17]: 6).

⁷⁹ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* dari judul *Asli Tarbiyatul 'Aulâd fil Islâm*, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 19.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*, Penej. Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 445.

⁸¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati 2002). Hlm. 409

Anak juga digambarkan sebagai penyejuk mata jika mereka berjalan pada jalannya orang-orang yang bertakwa.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾⁸²

Artinya: :*“Dan mereka senantiasa berkata, ‘Tuhan kami, anugrahanlah dari pasangan-pasangan kami serta anak keturunan kami, sebagai penyejuk-penyejuk mata dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa teladan-teladan.”* (QS. Al-Furqân [25]: 74).

Dari sini bisa dilihat kuatnya rasa kasih sayang yang Allah masukkan ke dalam hati orang tua kepada anak-anaknya. Tujuan dari yang demikian itu agar menjadikan dorongan untuk mendidik, menjaga, dan mengawasi segala urusan anak. Dalam hukum Islam usia *bâligh* bisa dikaitkan

⁸² Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Volume 9*, (Jakarta: PT.Lentera Hati, 2002), hlm.393.

dalam banyak hal, untuk pembahasan kali ini usia baligh dikaitkan dengan kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah pertamanya harus mengetahui terlebih dahulu definisi nafkah dan penjelasannya yakni:

2) Pengertian Nafkah

Kata “*Nafaqah*” terambil dari kata (الْأَنْفَاقُ) yang artinya sama “Mengeluarkan”.⁸³ Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari *masdhar* انْفَاق, yang berarti الإخراج, yang artinya (membelanjakan) kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafkah* adalah *nafaqat* (نَفَقَات) yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya.

⁸³ Ibnu Aby Zain, *Fiqih Klasik Terjemahan Fathal Mu'in Juz 4*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), hlm. 192.

Adapun nafkah menurut syara’
adalah:

كفاية من يمو نه من الطعام والكسوة
و السكنى.

Artinya: “Meskipun kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”⁸⁴

Kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk didalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, prabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.⁸⁵

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II. hlm. 765.

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al - Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 10 Terjemahan*, Penj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 95.

Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya, untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.⁸⁶

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁸⁷

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, papan.⁸⁸

⁸⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). hlm. 667

⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan, et. Al, (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1281

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm.166

3) Dasar Hukum Nafkah

Mengenai dasar hukum nafkah yang di maksud ialah dalil atau hujjah yang menunjukan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Dasar hukum yang dipakai untuk nafkah yakni dengan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits, diantaranya:

1. Al-Qur'an al-Karim

a) Q.S al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
 كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ الْوَالِدَةُ الْوَالِدُ وَلَا
 الْمَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾⁸⁹

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

⁸⁹ Al Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi* , Jilid 3.(Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm.198.

b) Q.S al-Talak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
 وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَأُولُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ ۖ وَآتَمَّرُوا بِهِنَّ
 بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
 فَمَسْطَرِضٌ لَهُ الْآخِرَىٰ ﴿٦﴾⁹⁰

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka

⁹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 dengan pendekatan Sejarah, sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm.192.

menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

2. Al-Hadits

a) Hadits riwayat Abdullāh bin ‘Umār

١١٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ

لِلَّهِ ص (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ

يَقُوتُ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ

بِلَفْظٍ (أَنْ يَجْهَسَ عِضْمَنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ).⁹¹

1173. Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar. Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw. : “Cukup bagi seseorang sebagai dosa bahwa ia sia-siakan (nafaqah) orang yang (wajib) ia memberi makan”. Dirwayatkannya oleh Nasá’I, dan itu di sisi Muslim dengan lafazh.....Bahwa ia menahan

⁹¹ Hasan, *Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-‘Asqalani*, (Bandung : CV Perbit Diponogoro, Cetakan XXVII,2006), hlm.513.

pemberian nafaqah dari orang yang ia miliki”.

b) Hadits riwayat dari ‘Āisyah

١١٦٨ - عَنْ عَا عِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ
عُتْبَةَ - أَمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ ص
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ ، وَيَكْفِي بَنِي
مَا يَكْفِينِي. إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ،
فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ (خُذِي
مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِي بَنِيكَ) مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.⁹²

Artinya:

1168. Dari ‘Aisyah. Ia berkata :
Hindun binti’Utba, Istri Abu’
Sufyân, telah datang berjumpa
Rasulullah saw. Lalu berkata : Ya
Rasulullah! Sesungguhnya Abu
Sufyân (adalah) yang bakhîl ; ia
tidak memberi kepada saya nafkah
yang mencukupi saya dan
mencukupi anak-anak saya, kecuali
apa-apa yang saya ambil dari

⁹² Hasan, *Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-‘Asqalani*, (Bandung : CV
Perbit Diponogoro, Cetakan XXVII,2006), hlm.511.

hartanya dengan tidak diketahui olehnya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Maka sabdanya : Ambilah dari hartanya apa yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu dengan cara yang baik”.

4) Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah

Diantaranya ada ketentuan syarat-syarat wajib Nafkah atas anak ada tiga:

- 1) Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja.

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama. Dan jika menolak mencari penghasilan pihak pengadilan berhak menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak

berkewajiban memberi nafkah pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak, sedangkan dia sendiri memninta nafkah dari orang lain karena orang yang tidak punya itu tidak mampu memberi. Inilah pendapat yang shahih. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak wajib bekerja untuk memberi nafkah anaknya jika memang ia sendiri susah meskipun masih mampu bekerja. Namun, ia tidak wajib bekerja untuk menafkahi anaknya yang juga miskin.⁹³

- 2) Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja.

Jika ia mempunyai harta yang dapat mencukupinya maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang lain. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja.

⁹³ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islm Wa Adillatuhu*, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011).hlm. 137

Anak kecil yang mampu bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seseorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan itu wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan, sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di dalamnya. Orang yang memiliki tempat tinggal bisa boleh saja fakir dan membutuhkan nafkah karena tempat tinggal adalah kebutuhan asasi dan tidak boleh dijual. adapun jika ia memiliki dua tempat tinggal atau lebih maka tidak dianggap membutuhkan, dan tidak berhak nafkah atas orang selainnya, baik dari ayah ke atas maupun keluarga anak kebawah karena salah satu tempat tinggalnya bisa dijual untuk menutupi kebutuhan.

Sedangkan orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja diantaranya sebagai berikut:

a) Anak Kecil

Artinya anak yang belum memasuki usia baligh atau usia bekerja. Jika anak lelaki bukan perempuan, sudah memasuki usia kerja maka ayahnya boleh mengupahnya atau menyuruhnya untuk bekerja, dan hasil kerjanya itu untuk memenuhi kebutuhan si anak itu sendiri. Adapun untuk anak perempuan maka tidak boleh disuruh bekerja sebagai pembantu, karena rawan terjadi khalwat yang dilarang oleh syara'. Akan tetapi boleh dititipkan, boleh dititipkan pada seorang wanita untuk belajar suatu keterampilan yang sesuai seperti menjahit, menenun, menyulam dan sejenisnya. Jika ia tidak memerlukan itu maka ia wajib bekerja untuk memenuhi nafkahnya

sendiri. Nafkahnya tidak wajib atas ayahnya kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya sendiri maka ayah wajib membantunya menutupi kekurangan. Adapun anak yang sudah besar maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah kecuali jika anak tersebut tumbuh lemah dan tidak mampu bekerja, baik karena idiot, kurang cerdas atau dungu atau karena cacat baik buta, lumpuh tangan dan kakinya buntung , atau sebab sedang mencari ilmu, karena memang banyaknya orang ointar hingga susah mencari pekerjaan, atau karena sakit yang menghalanginya untuk bekerja.

Ulama Hanabilah pendapatnya berbeda dengan mayoritas ulama. Mereka mewajibkan tetap mewajibkan nafkah bagi anak yang sudah dewasa namun miskin meskipun ia sehat. Mereka juga

mewajibkan nafkah bagi orang tua yang fakir meskipun masih sehat karena orang tua atau anak yang fakir itu tetap membutuhkan sehingga tetap berhak mendapatkan nafkah dari orang tua atau anaknya yang kaya. Sebagaimana halnya hukumnya jika seseorang sakit menahun yang menurut Hanabilah tetap wajib mendapatkan nafkah, karena pegangan mereka adalah wajibnya nafkah bagi anak yang dilahirkan atau orang tua melalaikan tanpa syarat kurang fisik atau kurangnya hukum-hukum yang dibebankan kepadanya ini menurut zhahir mazhab Hanabilah.⁹⁴

b) Perempuan

Anak perempuan yang fakir nafkahnya di ditanggung oleh ayahnya meskipun sudah sampai

⁹⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islm Wa Adillatuhu*, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 138.

menikah, dan kalau sudah menikah maka tanggung jawab nafkah itu beralih pada sang suami. Tetapi apabila kemudian ia bercerai dengan suami maka tanggung jawab itu kembali lagi pada ayahnya. Sang ayah tidak berhak memaksanya untuk bekerja. Jika dengan sendirinya ingin bekerja dalam pekerjaan yang mulia dan tidak menimbulkan fitnah, seperti menjahit, belajar, dibidang perawatan maka kewajiban ayahnya memberi nafkah gugur, kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya maka ayah yang membantu kekurangannya.

c) Sakit yang Menghalangi untuk Bekerja

Sakit yang menghalangi bekerja seperti buta, lumpuh, gila, idiot dan sejenisnya.

d) Para Penuntut Ilmu

Sibuk menuntut ilmu sehingga tidak punya waktu untuk bekerja.

Anak yang sedang menuntut ilmu nafkahnya wajib ditanggung oleh ayahnya, meski anak tersebut sebenarnya mampu untuk bekerja karena menuntut ilmu termasuk fardhu kifayah. Jika anak yang sedang menuntut ilmu diharuskan untuk bekerja maka berdampak buruk pada kemaslahatan masyarakat, tetapi dengan syarat anak tersebut termasuk anak yang rajin dan cerdas. Jika tidak cerdas atau lambat menangkap pelajaran yang diajarkan kepadanya maka tidak perlu lagi belajar, dan yang perlu dilakukannya adalah belajar bekerja.

Sebagaimana ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa seseorang yang mendapat celaan atau gunjingan karena bekerja, sebab status sosialnya atau termasuk orang yang mulia maka ia berhak

mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Ketika pendapat ini dikeritik.⁹⁵

- 3) Syarat selanjutnya adalah tidak berbeda agama

Menurut Hanabilah, jika berbeda agama dalam sambungan nasab maka anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya karena nafkah itu untuk kebaikan dan penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi anak yang berbeda agama, selain itu juga tidak termasuk dalam kategori kelompok yang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Artinya, baik anak maupun orang tua tidak berhak mendapatkan nafkah karena menurut mereka, orang yang mendapatkan nafkah itu adalah yang termasuk dalam kategori ahli waris, karena Allah SWT berfirman yang artinya, ... *dan waris pun berkewajiban demikian ...*”(al-Baqarah:

⁹⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al Islm Wa Adillatuhu*, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, ilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011).hlm. 139

233) Artinya, nafkah itu wajib diberikan kepada orang ada kaitan kekerabatan dan orang yang termasuk ahli waris. Jika bukan termasuk ahli waris maka tidak berhak mendapatkan nafkah tidak hubungan kekerabatan.

Mayoritas ulama selain Hanabilah, dalam masalah nafkah anak tidak mensyaratkan harus seagama, dalilnya firma Allah SWT yang artinya.

“... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” (al-Baqarah: 233).

Ayat ini menunjukkan bahwa kelahiranlah yang menyebabkan wajibnya nafkah anak atas ayahnya, baik seagama maupun tidak. Karena nafkah adalah penyambung hidup itu sangat urgen meskipun atas diri seorang kafir. Dan lagi, pada hakikatnya harta itu tidak begitu penting karena Allah juga memberi rezeki

kepada orang Mukmin dan juga kepada orang kafir.⁹⁶

Para fuqaha sepakat, jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, “... *Dan kewajiban ayah menanggung nafkahda n pakaian mereka dengan cara yang patut..*”(al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka seperti memberi nafkah untuk diri sendiri. Adapun jika ayah sudah tidak ada, atau ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mampu untuk bekerja. Sakit, atau sudah lanjut usia atau sejenisnya maka menurut

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 139.

pendapat Hanafiyyah tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur keatas masih ada, baik lelaki maupun perempuan jika memang mampu. Artinya, nafkah itu wajib atas seorang kakek terhadap cucunya jika memang mampu. Jika kakek atau ibu menanggung nafkah anak padahal ayah si anak tersebut masih ada, namun ekonominya sedang sulit maka ketika ekonominya memang baik, kakek dan ibu tadi boleh meminta ganti nafkah kepadanya karena, nafkah yang ia keluarkan itu menjadi utang bagi ayahnya. Sebagaimana juga bolehnya meminta ganti nafkah jika memang hakim memerintahkan.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau hanya menjadi tanggungan ayah sendiri, karena Rasulullah saw pernah berkata kepada seorang lelaki yang bertanya:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 اللَّهُ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى
 نَفْسِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى
 زَوْجَتِكَ. قَالَ : عِنْدِي آخَرُ. قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ
 عَلَى وَلَدِكَ؟ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ. قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ
 عَلَى خَادِ مِثْلِكَ؟ قَالَ : عِنْدِي آخَرُ. قَالَ : عِنْدِي
 آخَرُ. قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ.

Artinya: “Suatu hari ada seorang lelaki datang menghadap Rasulullah saw. Seraya berkata, ‘Ya Rasulullah, saya mempunyai uang suatu dinar. Beliau berkata, *‘Belanjakanlah untuk kebutuhanmu sendiri’*. Lelaki itu berkata lagi, ‘Saya masih mempunyai satu dinar lagi’. Beliau bersabda, *‘Belanjakanlah untuk istrimu’*. Lelaki itu berkata lagi, ‘Saya masih mempunyai satu dinar lagi’. Rasul bersabda, *‘Belanjakanlah untuk keperluan anakmu’*. Lelaki itu berkata lagi, ‘Saya masih mempunyai satu dinar lagi’. Lantas Rasulullah bersabda, *‘Belanjakanlah untuk pembantumu’*. Kemudian ketika lelaki itu

berkata, '*saya masih mempunyai satu dinar lagi*'. Beliau menjawab, '*Engkau lebih tahu penggunaan harta itu untuk siapa*'.⁹⁷

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya karena Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 233. Jika nafkah anak itu wajib atas ayah secara zhahir maka nafkah itu wajib juga atas ibu dan ia juga wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu hukumnya seperti ibu sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak.

Ulama Hanabilah dalam zhahir madzhabnya berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib di tanggung oleh setiap

⁹⁷ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authaar*, Vol. 6.(Surabaya: P.T. Bina Ilmu), Hlm. 321

ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya.

5) Gugurnya Nafkah Anak

Menurut para fuqaha, nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur. Hal ini berbeda dengan nafkah istri yang tidak gugur karena lewatnya masa dan meski sudah ditentukan oleh hakim atau saling rela, menurut hanafiyyah. Akan tetapi, nafkah itu gugur jika lewat masa sebelum ditentukan oleh hakim atau saling ridha. Umala Malikiyah mengecualikan keputusan hakim untuk nafkah kerabat yang tetap gugur meski lewatnya masa.

Ulama Hanafiyyah menuturkan bahwa jika seseorang menta'*jil* (mempercepat atau mengajukan) penyerahan nafkah kerabat untuk jangka waktu tertentu, lantas kerabat tersebut meninggal sebelum selesainya jangka waktu tersebut maka orang yang memberi nafkah tidak

boleh meminta kembali nafkah yang sudah terlanjur di keluarkannya.⁹⁸

Untuk kadar atau banyaknya nafkah Furu', berubahnya menjadi utang, gugurnya dan Ta'jil-nya nafkah furu, menurut para fuqaha sepakat, bahwa nafkah kerabat baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk pauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menetek sesuai dengan keadaan ekonomi Negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan jadi ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang yang diperlukan. Nafkah anak dalam *mazhab Hanafi* tidak lantas menjadi utang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi utang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela.

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz 10, Penj, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 142.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi utang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berutang. Sebab, sang ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

Menurut para fuqaha, nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur. Hal ini berbeda dengan nafkah istri yang tidak gugur karena lewatnya masa dan meski sudah ditentukan oleh hakim atau saling rela, menurut hanafiyyah. Akan tetapi, nafkah itu gugur jika lewat masa sebelum ditentukan oleh hakim atau saling ridha.

Ulama Malikiyah mengecualikan keputusan hakim untuk nafkah kerabat yang tetap tidak gugur meski lewatnya masa.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 142.

Salah satu sebab orang tua masih memberikan nafkah kepada anak dikarenakan ada dua factor di antaranya:

- 1) Usia, apakah anak sudah baligh ataukah belum.
- 2) Faktor kedua harta, apakah anak memiliki harta, sehingga masih bergantung kepada orang lain.

Hal itu karena proses perkembangan kemandirian pada anak yang tidak optimal. Kemandirian seperti halnya kondisi psikologis yang lain, dapat berkembang dengan baik apabila diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan sejak dini. Contohnya untuk usia anak 3-4 tahun, latihan kemandirian berupa membiarkan anak memasang kaos kaki dan sepatu sendiri, membereskan mainan setiap kali selesai bermain, dll. Sementara anak remaja berikan kebebasan misalnya dalam memilih jurusan, atau bidang studi yang diminatinya, atau memberikan kesempatan pada remaja untuk memutuskan sendiri jam berapa ia pulang kerumah jika remaja tersebut keluar

malambersama temannya (tentu saja orangtua perlu mendengarkan argumentasi yang disampaikan anak remaja sehubungan dengan keputusannya). Dengan memberikan latihan-latihan tersebut (tentu saja dengan unsur pengawasan diri orang tua untuk memastikan bahwa latihan tersebut benar-benar efektif). Berfikir secara objektif, tidak mudah dipengaruhi, berani mengambil keputusan sendiri, tumbuh rasa percaya diri, tidak tergantung pada orang lain dan dengan demikian kemandirian akan berkembang dengan baik.¹⁰⁰

Kemudian, perhatikan hal kecil lain yang dianggap remeh oleh sebagian orang tua yakni apa yang menjadi hambatan perkembangan dalam kemandirian dalam diri anak, sebab ini akan terbawa hingga ia dewasa atau baligh. Kebenaran hal ini bisa diketahui dengan kesaksian dan eksperimen ilmiah. Lantas yang menjadi penyebab seseorang individu mengalami hambatan dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan dalam hal kemandirian khususnya dependensi terhadap orang tua yakni:

¹⁰⁰ E- Jurnal, Musdalifah, M.Si. *Perkembangan Sosial Remaja Dalam Kemandirian Studi Kasus Hambatan Psikologis Sependensi Terhadap Orang Tua*, Volume 4 Juli-Desember 2007. Hlm. 50

- a. Tidak dapat mencapai kebebasan secara emosional dari orangtua. Ketika anak memasuki masa remaja, mereka ingin berkembang menjadi dewasa dan bebas dari sifat kekanak-kanakan (*childish*) dan ketergantungan pada orangtua, tapi ternyata dunia dewasa adalah asing dan rumit bagi mereka, sehingga menyebabkan mereka mempunyai keinginan untuk melanjutkan kehidupan yang aman dibawah perlindungan orangtua.
- b. Pola Asuh Orangtua. Pola asuh orangtua yang *permissive* akan membuat anak tidak dapat mandiri. Karena mereka mempunyai penghayatan bahwa anaknya adalah manusia muda yang tidak tahu apa-apa dan kurang berpengalaman sehingga mereka risau dan tidak dan tidak ingin anaknya mempunyai masalah dalam kehidupan ini. Apapun kebutuhan anak selalu dipenuhi tanpa melatih dan memberi kesempatan anak untuk mandiri.
- c. Kurangnya perhatian dari orangtua sehingga tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas

perkembangan atau kurangnya bimbingan untuk menguasai tugas perkembangan tersebut.

- d. Kurang adanya motivasi dari individu yang bersangkutan.¹⁰¹

Dalam cabang masalah serupa juga di bahas dalam kitab Fathal Mu'in yang berbunyi:

(فرع) من له أب وأم فنفقته على أب ، وقيل هي عليهما
لما بلغ ، ومن له أصل وفرع فعل الفرع وإن نزل ، أو له محتاجو
ن من أصول وفروع ولم يقدر على كفيتهم قدم نفسه ثم
زوجته وإن تعددت ، ثم الأقرب فالأقرب . نعم ، لو كان له
أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد
الكبير . ويجب على أم إرضاع ولدها اللبن وهو اللبن أول
الولادة ومدته يسيرة ، وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل
سبعة .

Dalam kutipan tersebut memiliki makna:
Orang yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka
nafkahnya menjadi tanggungan sang ayah. Ada

¹⁰¹ E-Journal Musdalifah, *Perkembangan Sosial Remaja Dalam Kemandirian Studi Kasus Hambatan Psikologis Sependensi Terhadap Orang Tua*, (Volume 4 Juli-Desember 2007), hlm. 52

dikaitkan, bagi yang telah baligh maka nafkahnya menjadi tanggungan berdua ayah dan ibu. Dan siapa saja memiliki orang tua dan juga keturunan, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang keturunannya dan terus kebawah. Atau barang siapa mempunyai beberapa orang tua atau keturunan yang memerlukan ditanggung nafkahnya sedang tidak mampu mencukupi semua, maka mendahulukan untuk dirinya sendiri kemudian istrinya sekalipun tidak hanya satu orang kemudian kerabat yang lebih dekat lalu yang lebih dekat. Memang jiwa mempunyai ayah, ibu dan anak, maka mendahulukan nafkah anaknya yang masih kecil kemudian ibu, kemudian ayah dan kemudian anak yang telah besar. Ibu diwajibkan menyusui anaknya dengan air susu Laba'nya, yaitu air susu yang keluar pertama kali (sejak) melahirkan dan masanya tidak lama. Ada dikatakan, kira-kira selama 3 hari, dan ada dikatakan selama 7 hari.¹⁰²

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua itu masih berkewajiban

¹⁰² Melvin Zainul Asyiqien, *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in Juz 4*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), hlm. 237-238.

memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anaknya tersebut sudah baligh atau dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja asalkan anak tersebut dalam keadaan miskin maka orang tua wajib untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Penulis melihat pada dasarnya nominal kadar nafkah tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits hanya menyebutkan *al-ma'rūf* yang menunjukkan bahwa suami harus memberikan nafkah yang baik kepada istri dan anaknya. Sehingga kata *al-ma'rūf* yang masuk dalam kategori '*āmm*' menimbulkan pendapat di kalangan para fuqaha' dengan alasan masing-masing. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa penyebutan kata *al-ma'rūf* yang umum tersebut merupakan upaya menjaga arah kebijakan al-Qur'an dan Hadis, sehingga tetap relevan di setiap masa dan tempat. Adapun ketentuan nominal kadar nafkah juga tidak tercantum dalam hukum positif yang ada di Indonesia.

B. Hubungan Usia Baligh Terhadap Kewajiban Orang Tua dalam Pemberian Nafkah menurut Hukum Positif

Di dalam hukum Positif yang menyinggung masalah pemberian nafkah pada anak yang sudah dewasa tidak dijelaskan begitu rinci. Hukum positif yang ada di Indonesia seperti dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kewajiban orang tua terhadap anak tersebut, diterangkan dalam pasal-pasal berikut ini:

a) UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Adapun ketentuan dalam pasal 41 huruf b, berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diartikan bahwasannya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah dua hal yang berbeda. Maka dari itu bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.¹⁰³

Pasal 45

- a. Kedu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

¹⁰³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 56.

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam ketentuan pasal tersebut batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua menjadi lebih jelas yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri. Adapun

maksud dari dapat berdiri sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hemat penulis, maksud dari frasa “dapat berdiri sendiri” tersebut berarti anak sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada kedua orang tua.

b) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Adapun apabila ditemukan sebuah fakta apabila orang tua dianggap tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka hal kewajiban tersebut bisa beralih. Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁰⁴

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁰⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm.. 58.

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrinya.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Pasal 104

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang lauak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah talak

ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau Negara. Rasulullah tidak pernah mengeksploitasi anak baik dalam ekonomi maupun seksual atau gender. Ubadah bin Al Walid berkata, Rasulullah bersabda, “Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan

berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai”.¹⁰⁵

c) UU Perlindungan Anak

Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang

¹⁰⁵ Maftuh Ahnan, dkk, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya :Terbit Terang,2000). hlm. 23.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melainkan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

Pasal 45

- 1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan .
- 2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan diatas jelas dan tegas untuk meminta tanggung jawab

mantan suami atas pemenuhan nafkah anak harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai hal tersebut ke Pengadilan. Mengupayakan pemenuhan kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah anak bisa juga dilakukan melalui jalur hukum pidana. Untuk hal ini terlebih dahulu harus mengupayakan laporan polisi bahwa mantan suami telah melakukan penelantaran anak.

Demikian urgen dan tegasnya ketentuan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran, yakni tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 43.

Sedangkan dalam pasal 77 huruf b disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun social, dipidana dengan pidana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dikatakan penelantaran anak apabila si orang tua melakukan tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

C. Pengaruh Memberikan Nafkah Untuk Perkembangan Anak yang Sudah Dewasa (Baligh) Dalam Ilmu Psikologi

Ruth Benedict sebagai seorang antropologis, dia berpendapat bahwa upaya mengasuh remaja sampai mampu menempati posisi dewasa secara penuh merupakan masalah pokok dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu dalam ilmu psikologi usia baligh atau disebut dewasa dalam Islam berbeda dengan keilmuan dan pandangan ahli psikologi. Menurut Konopka Pikunas masa remaja meliputi:

- a) masa remaja awal : 12- 15 tahun
- b) remaja madya : 15 – 18 tahun dan
- c) remaja akhir : 19 – 22 tahun

Sedangkan dalam Islam bila seseorang sudah keluar air mani dan haid maka ia di katakan sudah baligh, dan usia saat seseorang mengeluarkan air mani kisaran 15 tahun bagi laki-laki, menstruasi di usia 9 tahun bagi perempuan. Namun di usia sekian dalam pandangan ilmu psikologi anak belum di katakan dewasa melainkan masih berada pada masa remaja awal. Pandangan psikologi menjelaskannya dengan lebih detail. Bagi kalangan psikolog dewasa dicirikan dengan kematangan, baik kematangan kognotif, efektif maupun psikomotornya, yang mengacu kepada sikap bertanggung jawab. Seseorang yang matang menurut Anderson memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego;
2. Mempunyai tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efesien;
3. Dapat mengendalikan perasaan pribadinya;
4. Mempunyai sikap yang objektif;
5. Menerima kritik dan saran;

6. Bertanggung jawab;
7. Dapat menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang realitas dan baru.

Dari dua pandangan seperti dikatakan tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa seseorang dapat disebut dewasa apabila telah sempurna pertumbuhan fisiknya dan mencapai kematangan psikologis sehingga mampu hidup dan berperan bersama-sama orang dewasa lainnya.¹⁰⁷

Pengaruh memberikan nafkah bagi perkembangan anak yang sudah dewasa memiliki beberapa pandangan yang harus dipertimbangkan untuk proses tumbuh kembang seseorang:

- 1) Dalam perspektif psikologis akan mengganggu *sense of identity vs role confusion* yaitu perasaan dan kesadaran akan jati dirinya. Anak yang sudah baligh atau dewasa jika terlalu mendapatkan apapun kebutuhan dan tidak dilatih untuk memikirkan masa depan dan bekerja, maka anak tersebut akan dihadapkan dengan berbagai pertanyaan yang menyangkut keberadaan dirinya.

¹⁰⁷ Sudirman Sommeng, M. Sos. I, *Psikologi Umum dan Perkembangan* (Samata, 1 November, 2012), hlm. 230.

Siapa saya?, untuk masa depannya dia akan berpikir “akan menjadi seperti apa saya?”. Dalam peran-peran sosial ia akan berfikir “apa peran saya dalam keluarga dan masyarakat?”. Suasana kebingungan ini akan berdampak kurang baik yaitu ketergantungan pada orang tua. Karena gejala ini timbul disebabkan sikap dan perlakuan orang tua yang kurang memberikan peluang kepada anak yang sudah dewasa tadi untuk mengembangkan dirinya searah dengan peran-peran social yang akan diembannya di masa depan.

- 2) Pengaruh lainnya adalah konflik antara orang tua dengan anak, ini masuk ke dalam perspektif sosiologis dan antropologis. Yang dimaksud disini orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menyosialisasikan anak. Dizaman sekarang orang tua sulit atau tidak dapat memperbaharui pandangannya, sebab yang mereka pikirkan dirinya merupakan produk pengalaman. Perlu ditegaskan ini termaksud pola asuh yang memanjakan permistif (*indulgent*) yang pola asuh ini memperlihatkan bahwa orang tua memberikan banyak kebebasan kepada anak dan kurang memberikan contoh.

Orang tua bersikap damai dan selalu menyerah pada anak. Akhirnya menimbulkan serangkaian dampak buruk yakni, anak akan mempunyai harga diri yang rendah, tidak mempunyai control diri yang baik, kemampuan sosialnya buruk, dan merasa bukan bagian penting untuk orang tuanya, dan ini terbawa hingga dewasa bahkan akan mereka terapkan pada anak keturunannya. Konflik yang ditunjukkan antara orang tua dan anak diantaranya:

- a. anak sedang mencapai puncak pertumbuhan fisik dan energy.
- b. sistem social orang tua kurang memberi peluang kepada anak untuk mengembangkan diri.
- c. anak bersifat ideal, sementara orang tua bersikap pragmatis.

Hal ini juga di tunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses pendidikan beliau untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan keberanian. Beliau di usia 12 tahun ada yang berpendapat lebih 2 bulan sepuluh hari sudah ikut berdagang bersama pamannya Ali bin Abi Thalib ke Syam yang merupakan ibu kota

Harun. Di usia 15 tahun Rasulullah SAW ikut berperang dalam perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah, berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah di pegang oleh Harb bin Umayyah. Rasulullah Saw, saat itu bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali kepihak musuh.¹⁰⁸

Hal ini membuktikan bahwa psikologi usia baligh atau dewasa di zaman Rasulullah SAW, meliputi kemampuan memahami, mengaplikasikan dan memasuki ruh dan batin al-Qur'an dan al-Hikmah, sehingga buah dari ketaatannya kepada Allah Swt yang dengan ilmu sehingga *tajalli* (muncul) cahaya Allah Swt kedalam eksistensi dirinya sebagaimana para nabi.¹⁰⁹ Itulah kenapa pengaruh norma, moral, harapan-harapan, budaya dan social, ritual, tekanan kelompok memiliki peranan penting dalam menyuburkan jiwa-jiwa

¹⁰⁸ Syaikh Shafiiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, Penerj. Kathur Suhardi, Cet. 1.(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 55

¹⁰⁹ Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Psikologi Kenabian; Prophetic Psychology*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2010), hlm. 45.

kedewasaan yang hakiki pada seseorang. Dengan lingkungan social Rasulullah Saw, dikenal jujur ketika menjajakan dagangannya, beliau yang disiplin, hidup sederhana. Karena keikutsertaan beliau dalam banyak hal terkhusus perdangangan menjadikan ia dikenal dari banyak kalangan.

Ini merupakan bukti lain yang menunjukkan begitu penting hubungan social bisa membantu mengembangkan kedewasaan dalam diri seseorang. Karena mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga orang lain.

- 3) Dalam Perspektif Psikoanalisis,¹¹⁰ memiliki pandangan yang dinamakan mekanisme penambahan ego. Saat orang tua membiasakan memenuhi segala keinginan anak, termaksud tidak membiarkan anak berusaha untuk memperoleh kedewasaannya baik mencari pekerjaan sendiri ataupun mencoba hidup mandiri. Yang terbentuk dalam diri anak adalah sikap “Ego”. Disini anak akan menarik kecintaannya terhadap orang tua, dan mengalihkan atau memperluas perasaan cintanya

¹¹⁰ Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Hlm. 191

itu kepada pengganti orang tua (*displacement*). Proses ini sering mengarahkan untuk memperlakukan orang tua dengan sikap masa bodoh, sementara itu ia menggunakan banyak waktu dan energinya bagi pengganti orang tuanya. Ego untuk memperluas aktivitas keluar dari lingkungan keluarga. Kematangan fungsi ego merupakan persiapan bagi anak untuk menangani munculnya dorongan *insting*. Sedangkan jika orang tua menahan anak mereka yang sudah baligh atau dewasa untuk bekerja mencari pengalaman dan hanya mengandalkan kepunyaan orang tua, seperti uang jajan, dan nafkah lainnya. Maka masalah lain yang muncul adalah sikap manja, tidak mampu menghadapi suatu permasalahan, kehilangan kemampuan interpersonal. Menyebabkan berkembangnya kecemasan (*anxiety*).

Sedangkan “ego” mencoba untuk menintegrasikan pengikatan yang baru dengan mereduksi dorongan insting. Ego memproses testing alternatif-alternatif dengan memilih antara aktif dan pasif. Pilihan ini menjadikan seseorang

mengalami fluktuasi dalam berperilaku, diantaranya: sensitive atau koersif, hidup berkelompok atau menyendiri, optimis pesimis atau idealis materialis.

BAB IV
ANALISIS STATUS USIA BALIGH MENURUT
HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF TERKAIT
DENGAN KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM
PEMBERIAN NAFKAH

A. Analisis Status Usia baligh menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam bab terdahulu penulis sudah menjelaskan terkait dengan definisi baligh, baik dalam konsep hukum Islam maupun dalam konsep hukm positif. Dan hubungan antara usia baligh dengan kewajibannya orang tua. Maka dalam bab ini penulis akan menganalisa lebih lanjut mengenai kedudukan status baligh dalam hukum islam dan hukum positif yang sebenarnya.

Seperti yang kita tahu bahwasannya hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan, dikarenakan seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kwalifikasi pada perbuatan yang pada perinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa.

Seperti halnya pendapat Imâmiyah yang menetapkan usia baligh laki-laki adalah 15 tahun dan anak perempuan 9 tahun, berdasarkan hadits Ibnu Sina berikut ini:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا وَجَارَ

أَمْرُهَا وَأَقِيمَتِ الْحُدُودَ النَّامَةَ لَهَا وَعَلَيْهَا.¹¹¹

Apabila anak perempuan telah mencapai usia Sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya di pandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.

Allah telah berfirman mengenai ciri kematangan usia dewasa yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa [4]: 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang di jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada

¹¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), hlm. 56-57.

mereka kata-kata yang baik”. (Q.s. al-Nisa’ [4]: 5).

- a. *Bâligh* dalam al-Qur’an yang pertama, disebut dalam kalimat “*balagha al-hulum*” (Q.s. al-Nur [24]: 59).

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.s. al-Nur [24]: 59).

Kalimat ini mengandung kedewasaan seseorang dalam konteks kedewasaan fisik yang di tandai dengan mimpi basah.

- b. Yang kedua, *Bâligh* yang disebutkan dalam kalimat “*balaghū al-nikâh*” di dalam (Q.s. al-Nisa’ [4]: 59). Yang berarti sudah cukup umur

untuk menikah, yang ditandai dengan *al-rusyd* (cakap dan pandai).

وَابْتَئِلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ
 آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ
 كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَفِ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
 حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di

antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (Q.s. al- Nisa’ [4]: 59)

Kata *Bâligh* disini memberi pengertian tentang kedewasaan seseorang dalam konteks tanggung jawab, khususnya tanggungjawab dan kecakapan dalam mengelola harta. Tanggungjawab terkait erat dengan mental, pikiran dan psikologi seseorang.

- c. Dan ketiga, *Bâligh* yang disebutkan dalam kalimat “*balagha asyuddah*” di dalam (Q.s. al-Ahqaf [26]: 15 dan Q.s. al-Qashash: [28]: 14) yakni telah sempurna kekuatannya, akal nya, dan pandangannya.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".(Q.s. al-Ahqaf [26]: 15)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
 ۖ وَكَذَٰلِكَ يُخَوِّزُ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akal nya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.s. al-Qashash: [28]: 14)

Bâligh dalam ayat ini berbicara dalam konteks kematangan seseorang. Dalam hal ini *bâligh* bisa diibaratkan seperti buah yang secara alamiah telah matang dipohonnya sehingga siap untuk dipetik atau dipanen lalu di makan.

Ketiga pengertian *bâligh* tersebut jika didekati dengan pendekatan *tafsîr al âyat bi al-âyat*, maka bisa saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif tentang kedewasaan. Selama ini pengertian dewasa yang dikenal adalah secara fisik saja, dan itu merupakan reduksi terhadap makna kedewasaan menurut al-Qur'an, menggunakan satu ayat dan mengabaikan ayat-ayat yang lain. Jika selama ini, misalnya seseorang anak berusia 15 tahun sudah dianggap dewasa karena telah mengalami mimpi basah, sejatinya pengertian tersebut telah mereduksi ayat-ayat lainnya yang menegaskan

tentang aspek kedewasaan yang lebih substansi dan esensial yaitu *al-rusyd* (kecakapan dan kepandaian) dan *asyuddah* (telah sempurna kekuatannya, akalnya, dan pandangannya). Bila ketiga pengertian tersebut dipadukan, maka dewasa menurut al-Qur'an adalah dewasa secara fisik, pikiran, mental, psikologis, sudah memiliki tanggungjawab, dan sudah matang seperti buah yang matang di pohonnya dan siap untuk dipetik dan dimakan.

Setatus baligh dalam hukum Islam, menurut pandangan DR. KH. Fadhlolan Musyaffa' Lc., MA. Yakni ada hukum yang mengatakan usia baligh adalah 15 tahun dan 18 tahun, dan jeda tiga tahun itu perbedaanya. Semakin lebih dini lebih baik. Maka qiyās-nya adalah qiyās *Al-Awlawwiyat* (keutamaan). Seandainya diikuti 18 tahun, dan ternyata kewajiban orang tua adalah 15 tahun, ini kan urusan maqasidu Syari'ah. Maqasidu syari'ah itu adalah tujuan syari'ah. Kenapa disyariatkan? Orang tua diwajibkan untuk memulai memerintah dan diwajibkan shalat anaknya saat ia tamyiz 7 tahun sampai 10 tahun kalau dia tidak shalat maka diperintahkan untuk memukul itu perintah syari'atnya. Dan hal itu memiliki maqasid tujuan

syari'ah. Kenapa seperti itu? Karena jangan sampai masuk 10 tahun anak yang sudah dekat dengan baligh tetapi dia belum mengerti kewajiban dan belum melakukan. Sementara baligh itu adalah bisa lebih cepat untuk perempuan di usia 9 tahun bisa juga kurang dari 9 tahun. Maka usia 9 tahun bagi perempuan itu ukurannya di tengah-tengah antara usia 7 dan 10 tahun. Sementara untuk laki-laki itu antara usia 13 tahun dan 15 tahun, tidak pasti 15 tahun. Jadi *Ikhtilam* mimpi basah untuk lelaki tidak mesti pas di usia 15 tahun. Inilah *istikharahnya* imam Syafi'i dalam *Haddul Buluḡ*. Mengapa imam Hanafi berpendapat usia baligh itu 18 tahun? Menurut penelitian imam Hanafi yang bukan *istighroq* menggunakan dalil qiyas, karena Imam syafi'I dengan Imam Hanafi itu *nuqtatul intilaq fil ijtihaat* nya berbeda (titik tolak yang merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam) nya beda.

Madzhab Syafi'I kalau dikatakan antara madzhab yang lain lebih komprehensif. Dikarenakan mengadopsi 2 madzhab yaitu hanafi dan maliki, lebih kuat dan lebih teliti serta lebih falid karena *istighroq* nya dan lebih *lil iḥtiyaath* lebih hati-hati. Dalam hal ini DR. KH. Fadlolan Musyaffa' Lc., MA. Menegaskan bahwa beliau tidak bermaksud menyalahkan madzhab hanafi. Jika diminta untuk memilih

antara madzhab Hanafi dan madzhab Safi'I dalam hal usia baligh maka beliau lebih condong pada madzhab Syafi'I di dalam *haddul Bulugh*, Imam Syafi'i 15 tahun Imam Hanafi 18 tahun pilihlah madzhab syafi'I dengan alasan, karena *lil ihtiyaath* kehati-hatian. Karena kalau sampai umur 18 tahun pasti sudah baligh. Lalu bagaimana jika baligh di usia sebelumnya apakah belum kewajiban karena dibatasi dengan usia 18 tahun, makanya hal itu tidak masuk dalam *ihtiyaath* fiqh. Maka usia 15 tahun menjangking seluruhnya otomatis masuk kedalamnya. Sementara madzhab Syafi'i *istighroq-nya* antara 13 tahun dan 15 tahun, apalagi di kaitkan dengan zaman modern, madzhab syafi'I lebih relefan karena hormone lebih berubah, waktu usia lebih pendek dan anak perempuan lebih cepat haid karena makanannya lebih banyak mengandung hormonal, laki-laki juga seperti itu. Kenapa madzhab Syafi'i mengikuti hukum Syari'ah apalagi yang diadopsi adalah madzhab Syafi'I maka ini adalah *lil ihtiyaath* (kehati-hatian) dan sesuai dengan tantangan zaman sekarang maka itu lebih maju.¹¹²

Menurut penulis dalam masa sekarang ini, dibutuhkan hukum yang dapat menjadi ukuran bagi

¹¹² Wawancara dengan DR. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc., MA. (Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang) Jum'ad 21 Juni 2019. Pukul: 16.56 WIB.

perkembangan kedewasaan anak khususnya usia dewasa. Namun dengan mengkaji banyak dalil-dalil dalam ilmu fiqh. Penulis menemukan bahwasannya usia bâligh yang ditentukan para fuqaha dan ulama ternyata memiliki kemaslahatan dan pertimbangan terutama untuk memulai mengajar dan mendidik anak-anak mereka dalam Islam, karena dikhawatirkan jika usia baligh dimundurkan menjadi lebih tua seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Hanafi yakni 18 tahun, akan timbul mafsadah. *Mafsadah* yakni asal perkatanya dari *fasada-yafsudu-fasadan* yang bermaksud sesuatu yang rusak. Makna *mafsadah* secara bahasa juga diartikan dengan kemudharatan. Secara ringkasnya rumusan makna *mafsadah* menurut istilah Ulama adalah: Imam al-Gazzalî berpendapat, setiap perkara yang lima (*al-us li al-khamsah*) merupakan *mafsadah*. Intinya *mafsadah* ialah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan yang lima, terjadi atas mayoritas manusia atau individu.¹¹³ Dikarena usia baligh yang sudah dipertibangkan tersebut yakni 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan

¹¹³ Jurnal, Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah satu analisis, Penulis. Akbar Sarif dan Ridwan bin Ahmad, hlm.5-6.

dimaksudkan untuk mendidik, mengajarkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anak-anak yang sudah memasuki usia baligh dan semakin cepat usia baligh semakin cepat pula anak akan belajar dan memahami kewajiban mereka termaksud, kewajiban yang dibebankan oleh syari'ah. Karena akan sangat membahayakan bila mereka masih belum memahami dan mengerti akan kewajiban yang dibebankan syari'ah jika sudah terlajur mencapai usia yang terlalu tua. Diantaranya melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Para fuqaha melihat di usia ini pendidikan adalah faktor penting terhadap eksistensi sebuah peradaban. Bahkan, bisa dikatakan bahwa pendidikan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan. Melalui pendidikan yang benar, maka kemajuan suatu bangsa dapat tercapai.

Dengan alasan inilah usia yang paling ideal adalah sedini mungkin untuk mengajarkan kewajiban beragama bagi anak usia baligh yakni anatar 12-15 tahun untuk laki-laki bahwa ia keluar air mani yang dibarengi dengan syahwat, dan 9 tahun untuk perempuan jika ia bermimpi dan melihat ada cairan kuning yang tidak kental pada pakaiannya ketika ia terbangun atau jika ia melihat ada darah haid yang keluar berarti ia telah memasuki usia baligh

dengan ini dikenai hukum syar'i baginya. Maka anak laki-laki dan perempuan yang sudah baligh telah dibebani kewajiban-kewajiban yang dikenakan kepada pria dewasa dan wanita dewasa pada umumnya.¹¹⁴ Di dalam Islam pentingnya pendidikan terhadap anak mendapatkan porsi yang besar. Hanya saja muncul permasalahan bahwa mayoritas masyarakat belum begitu memahami perihal adanya skala prioritas dalam pendidikan anak di dalam Islam. akhirnya anak-anak terlambat mendapatkan pemahaman. Usia baligh ini adalah masa keemasan bagi anak saat ia mulai bisa membedakan hukum syar'i yang mengatur tentang kematangan seksualnya. Bagi anak laki-laki maupun perempuan, sama saja karena mereka sama-sama mukallaf yang telah dibebani hukum syar'i dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Status baligh dalam hukum positif penulis merujuk pada:

a. Undang-Undang Indonesia

Pada Undang-undang Indonesia dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 330 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum

¹¹⁴ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam dari kitab Tarbiyatul 'Aulâd fil Islâm*, (Solo: Insan Kamil, 2012), Hlm. 463.

mencapai umur genap 21 tahun dan tidak boleh dahulu kawin. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 tentang HAM pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹¹⁵

Adapun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seseorang digolongkan sebagai anak. Adapun secara tersirat dalam pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya, dan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.¹¹⁶

Disisi lain, pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang

¹¹⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 17.

¹¹⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 18.

tuanya. Sedangkan dalam Inpres usia RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia dewasa diatur dalam pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun spanjang anaktersebut tidak cacat fisik dan mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.¹¹⁷

Dari beberapa Undang-undang diatas, anak yang dimaksud dalam pemberian nafkah ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.¹¹⁸

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan, sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/SIP/152 tanggal 1 juni 1955 dinyatakan bahwa 15 tahun dianggap telah dewasa untuk kasus yang terjadi di wilayah Bali. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 601 K/SIP/1976, dinyatakan bahwa tanggal November

¹¹⁷ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999). Hlm. 18.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

1976 umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.¹¹⁹

c. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Karena Indonesia berlaku hukum adat penulis melihat dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa, menurut penelitian Supomo tentang Hukum Perdata adat di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi: 1. Dapat bekerja sendiri, 2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, 3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.¹²⁰

Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.¹²¹

Penulis menganalisis dari perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia bahwa status baligh atau dewasa dalam hukum positif sejatinya di atur

¹¹⁹ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press,1998), hlm. 9

¹²⁰ Darwan Prints dalam Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press,2003), hlm. 19

¹²¹ *Ibid*, hlm. 20.

husus berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan memang masih tidak ditemukan keseragaman mengenai usia dewasa seseorang berikut ini data usia dewasa menurut hukum:

- 1) 16 Tahun terdapat pada : Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) 18 Tahun yakni terdapat pada :
 - a) Pasal 47 UU Perkawinan (Undang-Undang No- 1 Tahun 1974).
 - b) Pasal 1 Angka 26 UU Tenaga Kerja (Undang-undang No. 13 Tahun 2003)
 - c) Pasal 1 Angka 3-5 UU Peradilan Anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).
 - d) Pasal 1 Angka 5 UU HAM (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999)
 - e) Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014)
 - f) Pasal 1 Angka 4 UU Pornografi (Undang-Undang No. 44 Tahun 2008)

- g) Pasal 4 Huruf h tentang UU Kewarganegaraan (Undang-Undang No. 12 Tahun 2006)
 - h) Pasal 1 Angka 5 tentang UU Pemberantasan Perdagangan Manusia (Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)
- 3) 21 Tahun terdapat pada : Pasal 330 (KUHPer) dan Pasal 9 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Usia dewasa di atas penulis dapatkan dari rekomendasi Hakim Ketua Pengadilan Negeri Ungaran yaitu bapak Wasis Priyanto, S.H., M.H. Ketidakseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Ketentuan usia dewasa dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Karena usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal ini penulis melihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan alasan karena Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak dan batasan usia dikategorikan sebagai anak atau yang belum dewasa, dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

Pasal 1

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002 ini telah mengatur mengenai definisi pengertian anak, sehingga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu sebagai berikut.

Pasal 1

Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara tegas ketentuan mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya menyatakan yang berhak mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Adapun kecondongan terhadap definisi anak ini, menurut penulis secara tidak langsung mengatarkan kita kepada suatu pengetahuan yang tersirat. Dengan demikian telah anda ketahui dengan pasti bahwa dari beberapa aturan yang berbeda ini, definisi anak tetap memiliki pengertian yang sama. Undang-Undang secara berangsur sepakat bahwa batas kedewasaan seseorang itu jatuh kepada usia 18 tahun. Hakim pengadilan Negeri Ungaran pun

menggunakan ini untuk membedakan mana yang anak dan bukan anak.

Oleh karena itu, status Baligh dalam hukum positif dapat dikelompokkan dan dibuat perbedaan di antara dalam:

- a. Dewasa Politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu.
- b. Dewasa Seksual, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru.
- c. Dewasa Hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

B. Analisis Kaitannya usia baligh terhadap kewajiban orang tua dalam Pemberian Nafkah.

Sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Kewajiban menafkahi anak ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ج
٥

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”(QS.Al- Baqarah ayat 233).

Menafkahi anak bagi orang tua merupakan kewajiban yang dibebankan oleh syara’ berdasarkan nilai kasih sayang, sehingga kewajiban ini meski sejatinya dikhususkan bagi ayah, namun kewajiban menafkahi menjadi gugur jika ibu atau orang lain terlebih dahulu memberikan kepada anak (*tabarru'*) keperluan dan kebutuhan sehari-harinya. Kadar menafkahi anak tidak ditentukan dalam nominal uang atau ukuran makanan, sebab kebutuhan masing-masing anak berbeda-beda berdasarkan usia dan gaya hidupnya. Namun secara umum, komoditi yang diperlukan oleh anak biasanya meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat pokok. Selebihnya hanya bersifat sekunder yang hanya wajib jika anak

membutuhkannya, seperti pelayan, barang elektronik dan kebutuhan lainnya.¹²²

Salah satu alasan wajibnya menafkahi anak bagi orang tua adalah dikarenakan anak tidak menghasilkan uang atau karena anak tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk biaya hidupnya. Sehingga ketika anak sudah beranjak baligh dan telah mampu untuk bekerja maka orang tua pada saat demikian sudah tidak wajib untuk menafkahnya, meskipun pada saat itu anaknya masih belum mendapatkan pekerjaan. Berbeda halnya ketika anak yang telah mampu untuk bekerja sedang dalam tahap mencari ilmu, seperti belajar di pesantren atau institusi pendidikan yang lain, sekiranya jika pendidikannya ditempuh dengan sambil bekerja, maka pendidikannya akan terbengkalai. Dalam kondisi demikian orang tua tetap wajib untuk menafkahi anaknya.

Penjelasan di atas sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam kitab *Hasyiyah al-Baijurr*.

فالغني الصغير الكبير لا تجب نفقته - إلى أن قال - وقد
استفيد مما تقدم أن الولد القادر على الكسب لا ثق به

¹²² Taqiyuddin Abu Bakar al-Husni, *Kifayah al-Akhyar*, juz 2, hlm. 3

لا تجب نفقته بل يكلف الكسب بل قد يقال أنه دخل في
الغني المذكور. ويستثنى ما لو كان مشغلاً بعلم

شرعي ويرجى منه النجاسة والكسب يمنعه فتجب نفقته
حينئذ ولا يكلف الكسب.

Artinya: “Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka. Dan dapat di pahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya. Dikecualikan karena anak yang mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syara’ dan di harapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk menuntutnya bekerja”.¹²³

Ketentuan di atas adalah ketentuan baku perihal batas menafkahi anak sesuai dengan rumusan para ulama’ yang kompeten, meski begitu alangkah baiknya dalam

¹²³ Syekh Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, juz 2, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-, 2019 A. D.-1440 H), hlm.349.

penerapannya, orang tua tetap mempertimbangkan kondisi anak tentang kesiapan mereka untuk hidup mandiri dengan cara bekerja dan tidak bergantung pada orang tua, jika memang secara mental belum siap, atau ia masih belum menemukan pekerjaan yang layak baginya, maka bijaknya orang tua dalam keadaan demikian tetap memberi nafkah pada anaknya, meskipun hal ini tidak wajib, dan hal ini orang tua tetap mendorong anak agar selalu berusaha hidup secara mandiri.

Kaitannya antara usia kedewasaannya anak yang sudah baligh dengan kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah yakni orang tua memberikan nafkah ketika sampai usia baligh, setelah itu gugur kewajiban orang tua dalam menafkahi anaknya. Lebih dari kewajiban namanya *Rohmah*, orang tua memiliki belas kasihan. Kasih sayang dengan kewajiban memiliki arti yang berbeda sekalipun orang tua sudah gugur kewajibannya tetap masih diberikan. Di luar kewajiban namanya *rohmah*, sebab orang tua lebih banyak rahmanya dibandingkan anak, nah disini bedanya antara rahmat dengan kewajiban.¹²⁴ Sedangkan dalam membahas mengenai

¹²⁴ Wawancara dengan DR. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc., MA.
(Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang) Jum'ad 21 Juni
2019.Pukul: 16.56 WIB.

pengaruhnya bila nafkah tetap diberikan kepada anak yang sudah baligh atau dewasa bagi perkembangan kemandirian, Dr. KH. Fadhrolan Musyaffa' Lc., MA. Menjelaskannya dari sisi fiqih dan yang menyangkut hal tersebut dibahas juga yakni dari segi etika, tetapi kalau berurusan dengan kewajiban dan lain-lain hal in sudah terlepas. Dan itu termasuk dalam *Khoriqul Adah* atau perkara yang diluar kebiasaan. Karena akan keluar tradisi di Arab, tradisi Indonesia, keluar tradisi Eropa dan ini adalah kondisional. Dikarenakan syari'ah tidak mengaturnya, kemudian budaya yang mengatur setempat maka ini akan berbeda-beda. Karena itu merupakan hukum psikis dan hukum tradisi adat.

Sedangkan untuk melihat tolak ukur usia baligh pada anak yang di anggap telah dewasa agar orang tua dapat melepas tanggung jawabnya. Beliau memberikan pendapat yakni karena yang disinggung dalam hal kewajiban orang tua kepada anak adalah hukum syar'i maka, yang diberikan kepada anak berupa pelajaran syari'at dan pelajaran agama dengan begitu anak akan mengerti dengan sendirinya. Caranya dengan anak diberikan pemahaman tentang agama, tentang syari'ah

agar cocok. Istilahnya antara pelajaran dengan amal, seseorang disuruh mengamalkan tetapi tidak paham maka akan sulit. Karena itu diberikan pelajaran dulu baru mengamalkan.

Perbedaan kedewasaan pada masa Rasulullah dengan masa sekarang menurut pendapat beliau, tidak ada perbedaannya anak perempuan lebih cepat dewasa dari pada anak laki-laki. Gambaran konkritnya anak perempuan yang masih kecil disuruh telanjang atau tidak berbusana dia akan merasa malu, sedangkan anak laki-laki yang masih kecil disuruh tidak berbusana atau telanjang masih bersedia, makanya dari sini secara kedewasaan anak laki-laki ini terlambat dari pada perempuan dilihat dari *haddul bulûgh* perempuan 9 tahun, sedangkan laki-laki 15 tahun bedanya 6 tahun dua kali lipat anak perempuan. Di zaman Rasulullah juga sama antara laki-laki dengan perempuan ada keterpautan. Sedangkan yang laki-laki yang dulu dengan sekarang maupun perempuan yang dulu dengan sekarangpun itu tidak ada perbedaannya, maka kecerdasan perempuan itu lebih cepat cerdas dari pada laki-laki. Tetapi usia wanita juga tergolong lebih pendek usia produktif-nya dan lainnya ini menurut hukum umum.

Sedangkan menurut pandangan pakar Tasawuf Psikoterapi memberikan apapun kepada anak hingga dewasa dapat berpengaruh bagi perkembangan kemandiriannya, diantaranya anak tidak akan bisa mandiri kalau terlalu di manjakan, anak juga tidak memiliki kreatifitas, segala sesuatu juga harus menunggu keputusan dari orang tua, dan dari kecil akan terbiasa dengan kondisi segala sesuatunya harus melalui izin orang tua, terbiasa harus diawasi orang tua, malah di dalam psikologi dinamakan dengan kepribadian cenderung dependen. Gangguan kepribadian dependen didefinisikan sebagai suatu pola perilaku berupa kebutuhan berlebih agar dirinya dipelihara yang menyebabkan seorang individu berperilaku submisif, bergantung kepada orang lain, dan ketakutan akan perpisahan dengan orang tempat ia bergantung, serta bersifat pervasive, berawal sejak dewasa muda dan nyata dalam berbagai situasi. Dan gangguan dependen lebih sering ditemukan pada wanita dibandingkan pria. Dan gangguan ini lebih sering terjadi pada anak usia muda dibandingkan usia yang lebih tua.

Gambaran klinis seseorang dengan gangguan kepribadian dependen menempatkan kebutuhan pribadinya lebih rendah di bandingkan orang lain, dan membuat

orang lain bertanggung jawab terhadap sebagian besar hidupnya, hilang kepercayaan diri, dan sering merasa tidak nyaman jika seorang diri dalam waktu yang singkat. Kelainan ini biasa disebut juga sebagai gangguan kepribadian pasif-dependen. Orang-orang dengan gangguan kepribadian dependen ini ditandai oleh pola ketergantungan yang pervasif dan kebiasaan patuh atau tunduk.

Sedangkan perbedaan kemandirian antara anak yang sudah baligh namun ketergantungan kepada orang tua dengan anak yang diberikan kebebasan, yang dimaksudkan diberikan kebebasan di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, jika si anak itu kembali lagi juga mempunyai tanggung jawab yang pasti jelas harus dia lakukan, karena kalau tidak seperti itu pasti si anak juga memiliki sikap anti sosial karena si anak merasa dimanja dan yang di khawatirkan dia akan memiliki sikap tidak peduli terhadap sesama kemudian kepeduliannya kurang itu justru lebih berbahaya.

Sedangkan tolak ukur usia dewasa yang dianggap benar-benar sudah mandiri dalam keilmuan psikologi, tidak bisa dilihat karena semua itu tergantung dari pola asuh, proses belajar, terkadang usia seseorang yang sudah

tua tetapi tidak dewasa banyak. Terkadang umur seseorang yang lebih muda justru lebih dewasa dari pada orang yang sudah tua umurnya. Jadi usia tidak pasti menjamin kedewasaan seseorang. Sedangkan ciri-ciri kedewasaan pada anak di zaman sekarang yakni bertanggung jawab dengan peran yang mestinya dia jalankan, yang kedua dia tahu tentang dirinya sendiri dan bagaimana ia harus memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan yang lainnya itu hanya merupakan fariabel-fariabel pendukung saja seperti dari segi pekerjaan, dari sisi ekonomi tetapi kalau dia bisa tanggung jawab dan dapat membina suatu hubungan baik dengan orang lain ini sudah dikatakan ia dewasa.¹²⁵

Bagi penulis, kasus yang diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Bireuen menjadi bukti bahwa penetapan batas usia nafkah sangat dibutuhkan oleh Pengadilan Agama.¹²⁶ Memerhatikan keputusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Bireuen, rujukan yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Wisnu Buntaran, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Dosen Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuludin UIN Walisongo Semarang) Selasa 25 Juni 2019. Pukul: 08. 47 WIB.

¹²⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor: 251/Pdt.G/2010/MS.LSM, dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor: 203/Pdt.G/2011/MS. Bir.

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jadi batas usia yang digunakan Pengadilan Agama saat ini adalah 21 tahun berdasarkan Pasal 156 poin d Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika ditinjau dari *maqasid al-syar'ah*, batas usia tersebut tidak layak lagi diterapkan pada masa sekarang. Sebab umumnya anak-anak di Indonesia pada usia tersebut belum dapat bekerja karena sedang menuntut ilmu, jadi belum mandiri.

Kesenjangan Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan realitas kekinian menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi perubahan sosial. Perubahan itu meliputi keadaan (*al-wa qī'*), kebiasaan (*al-awḍ'*), dan tatanan sosial (*al-nizām al-ijtim'iyah*) yang menghubungkan individu dengan masyarakat dan unsur-unsurnya. Juga terjadi perubahan perilaku individu dalam aktifitasnya yang memunculkan pola hubungan baru dan persoalan yang menuntut suatu aturan yang sesuai dengan kondisi baru.¹²⁷

Melihat realitas kekinian, umumnya di masa sekarang ini mahasiswa di tingkat strata satu menyelesaikan kuliahnya pada usia 22 tahun, itu pun jika kuliahnya lancar dan tepat waktu sesuai rencana. Tapi

¹²⁷ Marwan, Jurnal Ilmiah Islam Futura: *Batas Nafkah Anak Berdasarkan Maq Sid Al-Syar'ah*, Vol. 13. No. 2, Februari 2014, 230-249. Hlm. 243

kenyataanya hanya segelintir yang bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Dari situ, jika usia 21 tahun dipakai sebagai batas usia nafkah, tentu dapat menyebabkan anak-anak terganggu konsentrasi kuliahnya, bahkan berpeluang gagal. Berdasarkan Pasal 156 KHI, orangtua dapat menghentikan nafkahnya di saat anaknya sudah mencapai usia 21 tahun, padahal ia sedang menulis tugas akhir perkuliahan.

Di sisi lain terkait kemandirian, sejauh ini belum ditemukan satu sumber hukum Islam yang menetapkan batas usia di mana seseorang dianggap telah mampu bekerja. Dalam konteks ini jika dirujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68, disebutkan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak-anak. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Dan 18 adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Dari keterangan di atas, usia minimum seseorang boleh bekerja menurut perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia adalah 18 tahun. Tetapi bukan dalam artian kerja mandiri sehingga orangtua lepas dari kewajiban nafkah anak. Dengan demikian usia 18

tahun tidak bisa di generalisasikan sehingga dipakai sebagai batas kewajiban nafkah orang tua terhadap anak.

Putusan Pengadilan Agama yang dijalankan saat ini terkait kasus penetapan kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang tinggal bersama istrinya yang telah diceraikan mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Terkait batas usia nafkah, Pengadilan Agama menerapkan sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Hal ini berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam pasal 156 poin d Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa seorang suami wajib menafkahi anaknya walaupun ia sudah bercerai dan istrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun. Disini jelas UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI menggunakan kriteria “berdiri sendiri” dalam menetapkan usia 21 tahun sebagai batas. Mengingat tidak ditemukan nas syariat yang menetapkan batas usia, maka usia 21 tahun masih terbuka untuk diijtihadkan kembali. Dalam hal ini, batas usia ideal seorang anak yang dianggap mampu bekerja berdasarkan hukum syara’ dapat digali menggunakan *maqāṣid al-syar’ah* sebagai pisau analisis.

Pertimbangan ini tidak serta merta tanpa alasan sebab qiyās yang di gunakan adalah *Al-Awlawwiyat* (keutamaan). Jika tidak seperti ini akan hilang kemaslahatan yang seharusnya menjadi *maqāṣid al-syar'ah* atau tujuan, target syari'ah. Karena sumber pertama Agama Islam adalah Al-Qur'an yang mengandung berbagai ajaran. Dan Ulama membagi kandungan Al-Qur'an dalam tiga bagian besar yaitu, aqidah, akhlaq dan syariat. Dalam kamus bahasa Arab, *maqashad* dan *maqashid* berasal dari kata *qashd*. Maqashid adalah kata yang menunjukkan banyak jama', mufrodnya *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Tujuan dari syariah menurut syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dilaksanakan.

Fungsi dari *maqāṣid al-syar'ah* sendiri yakni menurut Lembaga fiqih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqashid syari'ah karena maqashid syari'ah memberikan manfaat sebagai berikut: Pertama, bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan hadits beserta hukumnya secara komprehensif. Kedua, bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqashid syari'ah sebagai salah satu

standar. Ketiga, memahami *ma'allat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia kemudian mengkaitkannya dengan ketentuan hukumnya. Tiga poin yang sudah penulis sebutkan di atas menunjukkan bahwa mengkaitkan status definisi baligh dalam hukum dengan maqashid syari'ah itu sangat penting supaya produk-produk itu tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia.

Batas-batas pemberian nafkah dengan usia terhadap gugurnya kewajiban orang tua dalam menafkahi anak yakni, orang tua sudah gugur kewajibannya dalam menafkahi anak saat usia anak sudah mencapai 18 tahun. Berdasarkan mazhab Hānāfi, usia ini adalah yang paling tinggi dari mazhab Syāfi'i yang menentukan usia *bāligh* 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, maupun Māliki yang menentukan usia *bāligh* 16 tahun. Penulis menyimpulkan bahwa batas usia ideal kewajiban menafkahi anak di Indonesia adalah 23 tahun. Alasannya, *pertama*, pada usia 22 tahun, umumnya anak-anak di Indonesia telah menyelesaikan strata satu. Lalu diberi kesempatan satu tahun untuk mencari pekerjaan sebelum benar-benar hidup mandiri. Dengan demikian setelah ia menamatkan studinya, ada waktu satu tahun bergantung

kepada orang tuanya. *Kedua*, perusahaan-prusahaan di Indonesia pada umumnya membatasi calon karyawan barunya pada usia 25 tahun. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan di Indonesia umumnya berbeda-beda dalam menetapkan batas usia anak. Dari usia 15 tahun sampai 21 tahun.

Perbedaan itu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana telah diterangkan diatas. Contohnya, untuk bertindak sendiri menghadapi perkara dilembaga pengadilan, seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun atau belum menikah masih dianggap anak-anak berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomor 477.

Untuk Pernikahan, seseorang perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun dan seorang laki-laki yang belum mencapai 19 tahun dianggap masih anak-anak berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan dan untuk dapat bekerja jika seseorang mencapai usia 18 tahun berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketnagakerjaan

dan untuk usia nafkah 21 tahun berdasarkan Pasal 156 poin di Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, ditinjau dari perspektif *al-maqāṣid al-Syar'iyah*, dengan mengacu kepada kemaslahatan orang tua dan anak, maka batas usia 23 tahun merupakan usia yang cocok bagi orangtua terlepas dari kewajiban menafkahi anaknya. Ini mengingat pada usia tersebut anak sudah memiliki kesempurnaan berfikir, kematangan bekerja dan keahlian. Kecakapan melakukan interaksi social yang dibutuhkan seseorang untuk mengelola hartanya dan terhindar dari penipuan orang lain. Bahkan usia *rusyd* merupakan syarat penting dalam mengelola harta sangat erat kaitannya dengan kemampuan untuk hidup mandiri.

Usia *rusyd* yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6, menurut Imām Hānafi, terwujud ketika seorang anak berusia 25 tahun. Sedangkan menurut Imām Syāfi'i, batas *rusyd* tidak dapat ditetapkan dengan usia, tetapi diketahui melalui kriteria, yaitu jika seorang anak sudah baik dalam mengelola harta walaupun dari sisi agama ia fasik, Kesimpulan ulama fikih, *rusyd* itu maksudnya baik dalam mengelola harta, meski mereka berbeda dalam penetapan batasnya.

Merujuk kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonsia dan pendapat para ulama melalui perspktif *maqāṣīd al-syar'ah*, maka dapat disimpulkan bahwa batas usia kewajiban nafkah orangtua terhadap anak adalah ketika anak mencapai usia 23 tahun. Dalam skripsi ini penulis menggunakan hukum positif hanya untuk sedikit perbandingan saja tidak menjadi pembahasan utama. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *bâligh* memiliki 3 ciri-ciri dalam agama Islam yakni:

Anak yang sudah بَلَغَ الْحُلُمَ (*balagha al-hulum*) belum bisa dianggap mandiri sebab kedewasaannya masih dalam konteks dewasa fisik yang bisa dilihat dengan perkembangan biologisnya dan belum tentu sudah *rusyd*. Sedangkan anak yang sudah بَلَغُوا النِّكَاحَ (*balahū al-nikāh*) sudah di anggap mandiri dari sisi kedewasaan dalam konteks bertanggung jawab dan kecakapan serta sudah bisa mengelola harta karena biasanya anak yang sudah menikah sudah bisa mengatur keuangan namun belum menjamin kedewasaan fikirannya. Sedangkan بَلَغَ أَشُدَّهُ (*balagha asyuddah*) dianggap telah memenuhi segalanya dari kesempurna akal nya, cara berfikir, tindakannya

pertimbangan melakukan sesuatu, benar-benar sudah matang dalam kepandaian serta telah sempurna kekuatannya dan pandangannya. Aspek kedewasaan ini yang lebih substansi dan esensial dengan *al-rusyd*.

C. Analisis Kelemahan Usia Bāligh Menurut Hukum Islam

Penulis menemukan kelemahan dari definisi بالغ (*bāligh*) menurut hukum Islam. Definisi baligh dalam hukum Islam ini menjadi problematika karena usia yang dianut hukum Islam yang dinyatakan baligh adalah 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. *Bāligh* dan *rusyd* adalah dua hal yang berbeda. *Bāligh* dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan dengan kematangan fisik, sedangkan *rusyd* bisa diterjemahkan dengan kematangan mental atau kematangan akal pikiran. *Bāligh* ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangkan *rusyd* ialah keadaan seseorang yang mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukan dan yang tidak, sesuatu yang mungkin dan yang tidak, dan diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun. Kemudian

diambil angka rata-rata kapan seseorang itu dipandang telah rasyd. Mungkin, akan ditemukan angka umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudian dijadikan standar baku untuk menentukan batas kedewasaan (rasyd) tersebut. Sementara disisi lain, dalam literature fiqh dikenal adanya satu mazhab yang mensyaratkan wali nikah harus sudah rasyd, tidak cukup sudah baligh. Mazhab tersebut adalah Hanafi.¹²⁸

Sedangkan, bagaimana hukumnya usia 15 tahun yang dikatakan baligh dalam hukum Islam bila melakukan jual beli tanah ataupun jual beli mobil senilai ratusan juta hingga milyaran rupiah?. Dan seandainya jika usia *bāligh* yang dikatakan ulama adalah 15 tahun, bagaimana dengan ungkapan syarat menjadi wali nikah adalah *bāligh*, padahal usianya masih 15 tahun belum dianggap layak jika harus menjadi wali nikah, karena di usia ini seseorang masih belum cukup dewasa dari aspek pemikiran dan sebagainya, apalagi melakukan transaksi besar yang risikonya lebih tinggi bagi anak yang berusia 15 tahun. Karena itu menurut penulis seharusnya tidak disamaratakan untuk usia 15 tahun dalam beberapa bidang

¹²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 32.

seperti muamalah. Harus ada pembedaan dan pengkategorian bila perlu usia baligh 15 tahun diperuntukan untuk beberapa bidang. Masalahnya hukum Islam tidak merincikan usia 15 tahun atau baligh untuk hal-hal yang menyangkut permasalahan sehari-hari yang dibutuhkan di era sekarang. Di era modern sangat dibutuhkan ketentuan yang dapat menampung segala kebutuhan untuk jangka panjang. Di hukum positif dibahas mengenai hal ini, sedangkan hukum Islam tidak dijelaskan usia berapa untuk melakukan transaksi besar, yang disepakati ulama definisi baligh adalah usia 15 tahun.

Di dalam muamalah ada jual beli yang diharamkan salah satunya adalah jual beli yang dilarang dengan sebab yang berakad (penjual dan pembeli). Contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan orang yang sedang dalam pengaruh alkohol atau mabuk. Kemudian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil baik yang sudah mumayyiz maupun tidak, sampai baligh.

Catatan tentang hukum jual beli anak kecil yang belum baligh namun sudah tamyiz juga dibahas. Para ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum tamyiz tidak sah, namun yang sudah tamyiz

tapi belum baligh ada yang mengatakan jual belinya sah dan juga ada yang mengatakan tidak sah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang berakal, yaitu tamyiz yang telah mencapai usia tujuh tahun adalah sah. Dalam hal ini mazhab Hanafi tidak mensyaratkan baligh dalam jual beli.¹²⁹ Oleh karena itu seorang anak kecil yang sudah tamyiz adalah 7 tahun, namun belum baligh maka jual belinya adalah sah apabila ia mendapat izin dari orang tua/wali dan karena menempati tempat orang tua sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa: [4] ayat 6 yang artinya, dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta itu kepada mereka. Namun jika tidak ada izin wali/orang tua maka jual belinya tidak sah.

Menurut analisis penulis dengan ini kelemahan dari definisi baligh menurut hukum Islam adalah:

¹²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Jilid 5 hlm. 3317)

1. Tidak adanya pengkategorian usia baligh untuk beberapa perbuatan seperti transaksi jual beli tanah hektar, atau jual beli mobil dengan harga yang tinggi.
2. Ketentuan definisi usia baligh menurut hukum Islam belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kemajuan di zaman sekarang. Yang lebih membutuhkan aturan yang relevan dan tidak samar.
3. Tidak adanya kebijakan atau bagian bidang hukum Islam yang memberikan atau mengeluarkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini karena usia yang diatur dalam hukum Islam tidak menjelaskan bila usia baligh yang dianggap mampu bertransaksi dengan nilai yang tinggi. Kebanyakan hanya membahas usia tamyiz yang dikatakan sah melakukan akad jual beli dengan nilai yang kecil.

Untuk ketentuan wali nasab dalam pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah *baligh*, sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini menunjukkan bahwa pemerintah berkeinginan agar wali nikah jangan sampai dilakukan anak-anak. Jika ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tetap diimplementasikan, maka

bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali dalam pernikahan, tentunya pernikahannya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Walaupun sudah ada parameter dari para perumus peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam mempertimbangkan syarat batas usia wali nasab yaitu batasan usia *rusyd* (kematangan mental), bukan baligh (kematangan fisik). Sebab telah dikemukakan di dalam hukum Islam, usia dewasa ditandai dengan suatu peristiwa biologis. Untuk kaum pria, ditandai dengan sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi basah. Sedangkan untuk kaum wanita, ditandai dengan menstruasi. Biasanya peristiwa ini dapat dirasakan atau dialami oleh pria pada usia 15 sampai 20 tahun dan wanita 9 sampai 19 tahun, maka *bāligh* paling lambat terjadi pada usia 15 tahun.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa bentuk *Ijtihad* yang digunakan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah penggabungan antara *Ijtihad Imtiqa'i* dan *Ijtihad Insyai*. Dikatakan *Ijtihad Intiqa'i* karena menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu. Yaitu, dengan lebih memilih pendapat ulama mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Dikatakan

menggunakan Ijtihad Insyā'i karena ia menambahkan unsur-unsur Ijtihad baru ke dalam mazhab Hambali tersebut, yakni batasan usia definisi *rusyd*, yang berupa syarat usia wali nasab sekurang-kurangnya 19 tahun. Sedangkan usia baligh untuk melakukan transaksi jual beli senilai ratusan juta untuk anak usia 15 tahun tidak dijelaskan dalam hukum Islam karena tidak ada pengkategorian usia. Pembatasan usia semacam ini belum pernah ditemukan ketentuan hukumnya dalam literature fiqh klasik.

Maka penulis menyimpulkan dalam hal ini merupakan hasil Ijtihad kontemporer yaitu peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini merupakan perkembangan progresif dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia. Untuk masalah transaksi jual beli tanah ataupun jual beli mobil yang senilai ratusan juta hingga milyaran, menurut pandangan penulis tidak sah bila dilakukan oleh anak yang berusia 15 tahun. Dengan ini penulis memiliki suatu gagasan yang sekiranya bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yakni mengklasifikasi atau menggolong-golongkan menurut keperluan dan

kemaslahatan serta kebutuhan agar sesuai dengan perkembangan dan tantangan di zaman modern di antaranya:

1. Untuk masalah melakukan atau menjalankan kewajiban syari'ah seperti ibadah mahdhah yakni shalat, wudhu, tayamum, mandi hadast, Adzan, Iqamat, shalat, Membaca al-Qur'an, I'tikaf, puasa, haji, umrah dan ibadah ghairu mahdhah, penulis setuju dengan penentuan usia baligh 15 tahun dikarenakan usia ini paling tepat untuk mengerti kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang mukallaf, dan harus melakukan perintah agama pendapat ini didasarkan pada *istikharahnya* imam Syafi'I dalam *Haddul Buluḡ*.
2. Untuk masalah wali nikah atau wali nasab penulis merujuk pada usia sekurang-kurangnya 19 tahun dengan dasar peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 karena usia ini dianggap rusyd yaitu dewasa tidak hanya sekedar fisik dan perkembangan biologisnya saja tapi kematangan mental dan fikirannya yang dianggap sah menjadi wali nikah.

3. Untuk masalah usia baligh yang digunakan untuk menikah menurut pendapat penulis usia yang tepat untuk menikah adalah 18 tahun ini didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan yang baru yakni usulan dari DPR dan DPD mengenai perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Usulan itu kini sudah masuk Program Legislasi Nasional 2015 - 2019. Walaupun saat ini usia 18 tahun juga dianggap masih bocah. Karena anak baru lulus SMA, kemungkinan usia perkawinan akan dinaikan karena dirasa banyak permasalahan dan kasus mengenai pernikahan yang dianggap masih dalam golongan anak-anak. Di Indonesia usia menikah ini memang diperbolehkan menikah menurut hukum, namun meresahkan sebagian besar orang tua dan anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya.
4. Untuk masalah usia baligh atau batas usia anak muda untuk melakukan transaksi jual beli tanah, rumah ataupun mobil yang bernilai jutaan hingga milyaran rupiah.

Di dalam pasal 1457 KUH Perdata disebutkan bahwa jual beli yakni:

untuk melakukan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Di dalam poin 2 Pasal 1320 KUH Perdata ialah adanya kecakapan (para pihak) untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan orang yang tidak cakap membuat perjanjian ialah orang-orang yang belum dewasa, dan mereka yang diatur di bawah pengampuan. Ini menurut pasal 1329 jo. 1330.

Menurut penulis walaupun aturan menyebutkan *bāligh* atau dewasa dengan berbeda-beda yakni usia 17,18, dan 21 tahun mereka yang telah menginjak usia tersebut tidak lagi dikategorikan anak kecil dan telah menginjak dewasa. Itu berarti 17 tahun bisa dikategorikan sebagai dewasa dan mampu melakukan jual beli rumah.

menurut pendapat penulis usia yang tepat adalah 21 tahun dengan alasan syarat KPR

dari beberapa bank yang diperbolehkan mengajukan pinjaman KPR ialah telah menginjak usia 21 tahun. Di samping itu anak muda yang telah berusia 21 tahun ini pun wajib memenuhi syarat di antaranya: memiliki pekerjaan serta penghasilan tetap, telah bekerja minimal satu tahun untuk yang berprofesi sebagai pegawai, telah menjalankan usaha selama dua tahun bagi wiraswasta dan pekerja profesional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dan mengkaji Definisi *bāligh* menurut hukum Islam dan hukum positif terkait kewajiban orang tua dalam pemberian nafkah, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa *bāligh* memiliki 3 ciri-ciri dalam agama Islam yakni *Balagha al-hulum* identik dengan kedewasaan seseorang dalam konteks kedewasaan fisik yang ditandai dengan mimpi basah atau secara biologis, Sedangkan *balaqhū al-nikāh* mengandung kedewasaan seseorang dalam konteks tanggung jawab terkait erat dengan mental khususnya dalam kecakapan dan mampu mengelola harta, kemudian *balagha asyuddah* seseorang yang dalam hal ini sudah sempurna akal nya. Dengan ini *bāligh* yang harus diikuti adalah *balagha asyuddah* yang mana aspek kedewasaan yang lebih substansi dan esensial yaitu *al-rusyd* (kecakapan dan kepandaian) dan telah *asyuddah* (telah sempurna kekuatannya, akal nya, dan pandangannya). Gugurnya nafkah orang tua terhadap anak yang sudah

bâligh dalam hukum Islam yakni usia 18 tahun orang tua sudah tidak wajib menafkahi anak. Namun demi pertimbangan untuk melepas dan tidak menafkahi anak di usia 18 tahun memiliki pengecualian demi kemaslahatan yang menjadi pertimbangan dengan tolak ukur telah mandiri. Di dalam hukum positif yang penulis rujuk dari Undang-Undang Indonesia KUHPerdara (BW), Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan KUKPidana merupakan perbandingan saja dengan hukum Islam. Namun jika dalam ilmu psikologi pertumbuhan kedewasaan dapat dilihat dengan perkembangan biologis tetapi untuk melihat kemandirian Bapak Wisnu Buntara, S.Psi., M.Psi., Psikolog mengatakan kemandirian tidak bisa dilihat dengan usia seseorang jadi, umur belum tentu menjamin kemandirian seseorang. Dengan begitu usia yang paling tepat di gunakan di Indonesia untuk berhenti menafkahi anak adalah di usia 23 tahun. Sebab di usia ini anak rata-rata sudah menyelesaikan pendidikannya yakni Strata 1.

B. Saran

Dalam mengkaji mengenai definisi baligh dari berbagai aspek hukum Islam dan hukum positif yang mana dibutuhkan banyak sumber, disebabkan penulis juga

menganalisis didalam ilmu psikologi agar dapat mencari makna atau status baligh yang benar-benar falid dengan tujuan agar dapat memudahkan serta membuka mata dan pemahaman para pembaca untuk lebih memperhatikan kewajibannya kepada anaknya namun juga pola asuhnya, proses pembentukan dan mendidik anak menjadi baligh yang sungguh bernilai dalam agama dan Negara sehingga kelak menjadi perhiasan kebaikannya dari orang tuanya.

Dan yang terakhir, peneliti menyadari, karena kekurangan kemampuan penulis, maka hasil ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan rasa hormat mempersembahkan bagi kedudukan akademika di masa yang akan datang, baik siapa-pun dan kapan-pun.

C. PENUTUP

Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan bagi penulis yang telah mampu menyelesaikan skripsi yang telah penulis susun sejak awal hingga saat ini. Skripsi ini merupakan sebuah karya terakhir penulis dalam menempuh strata satu (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam, sekaligus sebuah syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

Tidak lupa penulis harapkan kritik dan saran dari beberapa pihak guna menambah wawasan ilmu bagi penulis. Sebab tidak ada suatu karya yang sempurna oleh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih 'Ulwan, 2012, *Pendidikan Anak Dalam Islam dari kitab Tarbiyatul 'Aulād fil Islām*, (Solo: Insan Kamil).
- Abdullah bin Muhammad, 2004, *Tafsir Ibnu Katsīr Jilid 1*, Penj, M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dkk. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I).
- Abdul Mujib, 2002, Jusif Mudzkir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Abd al-Rahman al-Jazîrî, 2003, *Kūtāb al-Fiqh Alā Madzāhib al-Arba'ah*, (Bairut: Dār al-Ilmiyyah).
- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Abdul Wahhab Khallaf, 2002, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group).
- Abdul Aziz Dahlan, et. Al, (ed), 1997, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).
- A Hamid S. Attamimi, 1996, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (*Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*)" *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press).

- Ahmad Kami dan H.M, Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press).
- Al Dardiri, *al Şyarh al-Kabīr Ḥāsiyah Dāsukī*, Jilid III, (Mesir: Al Babi al Ḥalabī, t.thn.).
- Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaludin as Suyuthi, 1998, *Tafsīr al-Qur'ān al Karīm, Juz I*, (Beirut: Dār al Fikr).
- Andre Ataujan, 2012, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat).
- Al Qurthubi, Syaikh Imam, 2012, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- , 2014, *Usul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Kencana).
- Amin Farih ZA, 2008, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press).
- Al Qurtubi, 2008, *Tafsir Al Qurthubi*/Syaikh Imam Al Qurtubi, Penj, Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam).

Asmadi Alsa, 2003, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik*, (Yogyakarta: FH UII Press).

Chaerul Umam, 2000, *Usul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia).

Darwan Prist, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

-----, dalam Imam Jauhari, 2003, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press).

Dedi Supriyadi dan Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris).

Elizabeth B. Hurlock, 1980, *Developmental Psychology A Life Span Approach*, Mc. Graw Hil Book, (New York).

Faiqotul Mala, *Otoritas Hadits-hadits Bermasalah Dalam Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

Hamka, 2015, *Tafsir Al- Azhar*, jilid 6 Dalam Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, (Jakarta: Gema Insani).

-----, 2015 *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 dengan pendekatan Sejarah, sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, (Jakarta: Gema Insani).

- Hasan,2006, *Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, (Bandung: CV Perbit Diponogoro, Cetakan XXVII).
- Hamdani Bakran Adz-Dzakiey,2010, *Psikologi Kenabian; Prophetic Psychology*, (Yogyakarta: Fajar Media Press).
- Ibnu Aby Zain, 2015, *Fiqih Klasik Terjemahan Fathal Mu'in Juz 4*, (Kediri: Lirboy Press).
- Imam Muslim,1996, *Shahih Muslim, juz II*, (Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Imam Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari, Bab al-jana'iz, bab ma qila aulad al-musyrikin*, juz 5 dari Maktabah al-Shamila, hlm. 182. No. 1296
- Imam Asy-Syaukani,*Nailul Authaar*, Vol. 6.(Surabaya: P.T. Bina Ilmu)
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Kosasih. 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*. (Jakarta: Selemba Diniyah).
- LTN PBNU. 2010, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul ulama*, (Surabaya: Khalista).
- Marliana. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perkembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama).

-----, 2015, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Melvin Zainul Asyiqien. 2015, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in Juz 4*, (Kediri: Lirboyo Press).

Munawwir & Abib Bisri. 1999, *Kamus Al-Bisri Indonesia-ARAB Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif).

Muhammad Nadzir, 2003, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Muhammad Alī al-Shābūny. 1999, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Beyrut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah).

Muhammad Yunus. 1973, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an).

Muhammad Nawawi Al-Jawi. 2008, *Kāsyifatus Sajā*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah).

Munawar Kholil. 1955, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang).

Moeljatno. 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Ningrum Puji Lestari. 2005. *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu).

Nonon, mursyidah dkk. 2016. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Majelis Ulama Indonesia)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional .2008.
Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa).

Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor: 251/Pdt.G/2010/MS.LSM, dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor: 203/Pdt.G/2011/MS. Bir.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 taun 2014.

Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Volume 9*, (Jakarta: PT.Lentera Hati, 2002).

-----,2002. *Tafsīr Al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati).

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,1999).

Syaikh Shafiyyurahman Al-Mubarakfuri. 2008. *Sirah Nabawiyah*, Penerj. Kathur Suhardi, Cet. 1.(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

Syamsul Yusuf. 2008. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).

Subekti R., 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, (Jakarta: Intermasa).

Sudarsono,*Hukum Perkawinan Nasional*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

Suryanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqah Al-Ma'isyah Anak yang Sudah Menikah*, (Skripsi fakultas Syari'ah, Universitas Uslam Negri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Sudirman Sommeng, M. Sos. I, *Psikologi Umum dan Perkembangan* (Samata, 1 November, 2012).

Syamssuddin, *Transformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015).

S. Wojowasito. 1990. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoves).

Syekh Salim bin Sumair Al-Hadhram. 2012, *Terjemah Safinatun Najah Fiqih Islam Tingkat Menengah Penerjemah Susanto*, (Surabaya: Al-Miftah).

Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, 2011, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, Terjemahan dari Qawaa'idul Ahkaam fi Mashaalihi (Bandung: Nusa Media).

Syekh Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, juz 2, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-, 2019 A. D.-1440 H).

Sri Wahyuni, *Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta).

Tajul rifin, 2008, *Metode Penelitian, cet-1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wahbah Az-Zuhaili. 2013, *Tafsīr Al-Wasith Jilid II*, Penej. Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani).

-----,2011, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 10*, Penj, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani).

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPdata 2*, (Depok : Oktober 2006).

Wawancara dengan DR. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc., MA. (Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen) Jum'ad 21 Juni 2019.

Wawancara dengan Bapak Wisnu Buntaran, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Dosen Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuludin UIN Walisongo Semarang) Selasa 25 Juni 2019.

Bahan Jurnal terdiri dari :

E- Jurnal, Musdalifah, M.Si.*Perkembangan Sosial Remaja Dalam Kemandirian Studi Kasus Hambatan Psikologis Sependensi Terhadap Orang Tua*, Volume 4 Juli-Desember 2007.

Jurnal, Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah satu analisis, Penulis. Akbar Sarif dan Ridwan bin Ahmad.

Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah*, (jurnal ilmiah Islam Futura IAIN Al-Raniry Banda aceh, 2014).

-----, *Jurnal Ilmiah Islam Futura: Batas Nafkah Anak Berdasarkan Maq Sid Al-Syari'ah*, Vol. 13. No. 2, Februari 2014, 230-249.

Miftahul Jannah, *Jurnal Psiko islam media Remaja dan Tugas-tugas Perkembangannya Dalam Islam*, (Banda Aceh : Fakultas Psikologi Unversitas Islam Negeri Ar- Raniry), ISSN: 2503-3611, Volume 1, Nomor 1, April 2016, h. 246, di akses tanggal 28 November 2018.

Nurkholis, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan UU & Hukum Islam*, Yudisia, (Vol. 8 No. 1, Juni 2017).

Nahrowi, *E- Journal Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (KORDINAT Vol.XV No.2 Oktober 2016). hlm. 266-268. dikutip pada tanggal 29 November 2018.

Sayyidatul Fadlilah, *Pendidikan Akhlak Anak Dalam Keluarga (Sebuah Kajian tentang Fungsi dan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak) dalam SAWWA Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 4, Nomor 1, oktober 2010*).

Artikel oleh Witanto, *Pluralisme Batas Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Kajian Dalam Sudut*

Pandang Interdisipliner), Minggu 15 Januari 2012.
Di kutip pada tanggal 22 Juni 2019.

Bahan Internet:

Diakses dari “*Konsultasi Hukum – Hukum Adat*,” <http://www.asiamaya/konsultasi_hukum/adat/inexhtm> 6 Juni 2008. Pada tanggal 12 mei 2019, Pukul: 21.14 WIB.

Kematangan Emosional, Sumber dan terjemahan bebas diakses pada tanggal 19 April 2019 dari <http://www.marcandangel.com/2007/08/17/what-is-adulthood-20-defining-characteristics-of-a-true-adult>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.1 Wawancara Dengan: Nara Sumber 1

Nama : DR. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc., MA.
(Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlul
Mijen)

Tgl/bulan : Jum'ad 21 Juni 2019.

Pewawancara : Di dalam ukuran usia dewasa atau baligh terdapat batas usia yang berbeda lalu bagaimana status baligh menurut hukum Islam dan mana yang harus diikuti?

Terwawancara : Ada hukum yang mengatakan usia *bāligh* adalah 15 tahun dan 18 tahun, dan jeda tiga tahun itu perbedaanya. Semakin lebih dini lebih baik. Maka qiyās-nya adalah qiyās *Al-Awlawwiyat* (keutamaan). Seandainya diikuti 18 tahun, dan ternyata kewajiban orang tua adalah 15 tahun, ini kan urusan maqasidu Syari'ah. Maqasidu syari'ah itu adalah tujuan syari'ah. Kenapa disyariatkan? Orang tua diwajibkan untuk memulai memerintah

dan diwajibkan shalat anaknya saat ia tamyiz 7 tahun sampai 10 tahun kalau dia tidak shalat maka diperintahkan untuk memukul itu perintah syari'atnya. Dan hal itu memiliki maqasid tujuan syari'ah. Kenapa seperti itu? Karena jangan sampai masuk 10 tahun anak yang sudah dekat dengan baligh tetapi dia belum mengerti kewajiban dan belum melakukan. Sementara baligh itu adalah bisa lebih cepat untuk perempuan di usia 9 tahun bisa juga kurang dari 9 tahun. Maka usia 9 tahun bagi perempuan itu ukurannya di tengah-tengah antara usia 7 dan 10 tahun. Sementara untuk laki-laki itu antara usia 13 tahun dan 15 tahun, tidak pasti 15 tahun. Jadi *Ikhtilam* mimpi basah untuk lelaki tidak mesti pas di usia 15 tahun. Inilah *istikharahnya* imam Syafi'i dalam *Haddul Buluḡ*. Mengapa imam Hanafi berpendapat usia baligh itu 18 tahun? Menurut penelitian imam Hanafi yang bukan *istighroq* menggunakan dalil qiyas,

karena Imam syafi'I dengan Imam Hanafi itu *nuqtatul intilaq fil ijtiha* nya berbeda (titik tolak yang merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam) nya beda.membangun usul fiqihnya imam Syafi'I itu muridnya imam Hanafi Madzhab yang pertama kali muncul yaitu hanafiyah yang di bangun dari ra'yu karena itu ada: **مَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ يُبْنَى عَلَيْهِ**

(الرَّأْيُ), ra'yu itu qiyas. Kemudian muncul

Madzhab Maliki, yang mana madzhab Maliki ini yakni: **(يُبْنَى عَلَيْهِ الْمَذْهَبُ بِالسُّنَّةِ)**

dengan hadits. Kemudian muncul Imam ketiga yaitu Imam Syafi'i yakni: **(يُبْنَى عَلَيْهِ)**

(الْمَذْهَبُ بِالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ بِالرَّأْيِ وَلِسُنَّةِ) karena

mengadopsi madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Makanya madzhab Syafi'I kalau dikatakan antara madzhab yang lain lebih komprehensif.

Dikarenakan mengadopsi dua mazhab yaitu hanafi dan maliki, lebih kuat dan lebih teliti serta lebih valid karena *istighrooq* nya dan lebih *lil iḥtiyaath* lebih hati-hati. Jika disuruh memilih antara mazhab syafi'i dan hanafi maka pilihlah mazhab syafi' dalam *hadudul bulugh*. Imam Syafi'i 15 tahun Imam Hanafi 18 tahun kenapa? Karena *lil iḥtiyaath* kehati-hatian. Karena apa? Kalau sampai umur 18 tahun pasti sudah baligh, tetapi apabila baligh di usia sebelumnya terus bagaimana? Apakah belum kewajiban karena dibatasi dengan usia 18 tahun? Maka tidak masuk dalam *iḥtiyaath* fiqih, maka 15 tahun menjaring otomatis masuk, sementara Imam Syafi'i *istighrooq* nya antara 13 dan 15 tahun apalagi dikaitkan dengan zaman modern. Di zaman modern mazhab Syafi'i lebih relevan, kenapa? Hormone lebih berubah waktu usia lebih pendek, perempuan lebih cepat haid

karena makanannya lebih banyak mengandung hormonal.

Pewawancara : Apakah tuntunan agama Islam mana kala didapati pertentangan antara masalah Islam dan masalah anak, misalnya masalah Islam memutuskan bagi anak tidak wajib untuk dinafkahi, problemnya kemandirian anak zaman skarang berbeda-beda?

Terwawancara : Orang tua wajib memberikan nafkah itu sampai baligh, kalau sudah baligh sudah gugur kewajiban orang tua, sedangkan lebih dari kewajiban namanya *rahmah*, orang tua memiliki belas kasihan. Kasih sayang dengan kewajiban itu berbeda sekalipun orang tua sudah gugur kewajibannya tetap masih di kasih nafkah. Sebab orang tua banyak rahmatnya dibandingkan anak, bedakan rahmat dengan kewajiban. Orang tua bahkan memberikan warisan lagi pada anak.

Pewawancara: Apakah ada Pengaruhnya mmbrikan nafkah bagi anak yang sudah baligh untuk perkmbangan kemandiriannya?

Terwawancara: Kalau itu urusan Akhlak dan itu urusan Sikologi bukan fiqih, urusan fiqih berhenti sampai situ urusan kedewasaan dan lain-lain itu urusan psikis. Fiqih akan membahas tetapi dalam hal lain dan itu masuk *Khoriqul Adah karena nanti* keluar tradisi di arab, keluar tradisi eropa dan disini adalah Kondisional itu kenapa? Karena Syariah tidak mengatur maka budaya yang mengatur setempat. kalau dibuat satu ketentuan maka akan berbeda-beda di satu darah dengan daerah yang lain. Antara padang dengan jawa saja sudah berbeda apalagi antara Indonesia, Arab dan Eropa. Karena hukum adalah psikis dan tradisi adat, ranahnya bukan dengan fiqih lagi

Pewawancara: Lalu bagaimana melihat tolak ukur usia baligh agar orang tua bisa melepas

tanggung jawabnya untuk menafkahi anak?

Terwawancara: Makanya diberi ilmu agama, orang yang tidak tahu agama sampai tuapun tidak tahu agama. Berbicara tentang kewajiban dalam syar'I bukan kewajiban dalam hukum positif. Maka kasih pelajaran syari'at, pelajaran agama nanti dengan sendirinya anak akan mengerti. Kalau anak tidak tahu walaupun orang tua menggebu-gebu percuma karena tidak tahu. Sama dengan orang yang menerapkan hukum syari'at tapi tidak tahu syari'at, caranya hanya dengan memberikan pemahaman agama agar bisa cocok antara pelajaran dan pemahaman. Orang yang disuruh mengamalkan tapi paham bagaimana? Amal itu *ba'da ta'lim*, kasih pelajaran dulu baru mengamalkan.

Pewawancara: Apa perbedaan kedewasaan anak pada zaman sekarang dengan zaman Rasulullah?

Terwawancara: Tidak ada bedanya di arab atau dimana saja sama, yang anak perempuan lebih cepat dewasa dari pada laki-laki. Gambaran konkritnya *cah lanang cilik kon udo gelem, tapi cah wedok cilik kon udoh emoh, padahal lagek rodok gede sitik*. Makanya dari sini secara kedewasaan anak laki-laki terlambat dari pada anak perempuan. Bila dilihat *haddul bulugh* perempuan 9 tahun sedangkan laki-laki 15 tahun, lihat 6 tahun bedanya 2 kali lipatnya laki-laki. Anak perempuan 6 tahun *kon udo isen, anak laki-laki 6 tahun nggak malu*. Di zaman Rasulullah juga begitu sama saja ada keterpautan antara laki-laki dengan perempuan. Kecerdasan juga lebih cepat perempuan dari pada laki-laki. Tapi perempuan juga lebih cepat pendek.

Wawancara Dengan: Nara Sumber II

Nama : Wisnu Buntaran, S.Psi., M.Psi., Psikolog
(Dosen Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuludin
UIN Walisongo Semarang)

Tgl/bulan : Selasa 25 Juni 2019.

Pewawancara: Apa pengaruhnya bila memanjakan anak
bagi perkembangan kemandiriannya?

Terwawancara: Anak tidak akan bisa mandiri, anak tidak
mempunyai kreatifitas, segala sesuatu
biasanya harus menunggu keputusan dari
orang tua malah nanti kalau didalam
sikologi dinamakan dengan kepribadian
dependen karena memang dari kecil
terbiasa dimanjakan dan mendapatkan apa
pun yang diinginkan.

Perwawancara: Dimana letak perbedaan kemandirian pada
diri setiap anak untuk mmencapai usia
dewasa ?

Terwawancara: Kalau anak yang terbiasa diasuh oleh orang
tua, kemana-mana diikuti biasanya dari sisi

kemandiriannya biasanya jelas berbeda dengan anak-anak yang di *colke* bukan berarti diberikan kebebasan terus *sak karepmu*, tetapi diberi kebebasan yang bertanggung jawab, seandainya si anak itu kembali lagi juga memiliki tanggung jawab yang pasti yang harus dia lakukan, kalau nggak seperti itu pasti anak juga memiliki sikap anti social. Karena apa? Karena merasa dimanja. Yang berbahaya itu kalau dia tidak mempunyai sikap tidak peduli terhadap social, kepeduliannya kurang.

Pewawancara: Bagaimana melihat tolak ukur usia dewasa yang dianggap benar-benar sudah mandiri?

Terwawancara: Usia dewasa tidak bisa dipastikan karena kedewasaan itu tergantung dari pola asuh, adaptasi, proses belajar, kadang *uwes tuo rak dewasa akeh*. Seseorang bisa dikatakan dewasa itu dari cara berfikirnya, cara bersikapnya, cara berperilakunya kelihatan mana yang masih kekanak-kanakan dan mana yang sudah dewasa. Kalau

kedewasaan mungkin usia yang muda bisa lebih dewasa dari pada yang tua, kecuali kalau perkembangan jelas usia dianggap lebih tua tapi kedewasaan belum tentu.

Pewawancara: Bagaimana ciri-ciri psikologi kedewasaan pada diri anak zaman sekarang?

Terwawancara: Yang pasti jelas bertanggung jawab dengan peran yang mustinya ia jalankan itu jelas. Yang kedua dia tahu akan dirinya dan cara memperlakukan dirinya dan orang lain. Kalau yang lainnya itu mungkin hanya fariabel-fariabel pendukungnya saja, seperti dari sisi pekerjaan, dari sisi ekonomi. Kalau dia bisa bertanggung jawab dan membina suatu hubungan baik dengan orang lain itu berarti sudah dewasa.

1.2 Data Gambar

- a). Wawancara dengan DR. KH. Fadlolan Musyaffa', Lc., MA. (Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen) Jum'ad 21 Juni 2019.



- b). Wawancara dengan Bapak Wisnu Buntaran, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Dosen Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuludin UIN Walisongo Semarang) Selasa 25 Juni 2019.



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ulul Umami
2. Tempat & Tgl. Lahir : Demak, 18 November 1996
3. Alamat Asal : Desa Raji, RT 05 WR 02
Kec/Kab. Demak
4. Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun
Jln. Ngerobyong RT. 04/RW. 01
Dk. Wonorejo Mijen, Semarang.
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. HP : 082138470879 (WA)
/081325688618
7. E-mail : ululumami95@gmail.com

2) Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

- a. TK Nurul Iman Waiwerang (Nusa Tenggara Timur)
Lulus pada tahun 2002.
- b. SD Negeri Waiburak Kecamatan Adonara Timur,
Kabupaten Flores Timur (Nusa Tenggara Timur)
Lulus pada tahun 2009.
- c. MTs. Negeri Waiwerang Kecamatan Adonara Timur,
Kabupaten Flores Timur (Nusa Tenggara Timur)
Lulus pada tahun 2012.
- d. Madrasah Aliyah Negeri Demak lulus pada tahun 2015.

2. Pendidikan Non-Formal:

- a. Pondok Pesantren Al- Fattah Demak mulai Tahun
2013-2014